

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan perempuan bukan semata-mata persoalan ketiadaan penghasilan. Hal ini merupakan konstruksi sosial yang terbangun dari akumulasi berlapis mulai dari strukturalisme ekonomi yang tidak berpihak, sistem patriarkal yang mengekang akses dan mobilitas, hingga kelangkaan instrumen pemberdayaan yang benar-benar menyentuh akar persoalan secara holistik. Dalam konteks ini, perempuan kepala keluarga, khususnya janda, di wilayah pedesaan menempati posisi paling rentan sekaligus paling diabaikan dalam arsitektur pembangunan Indonesia. Mereka adalah subjek yang kerap muncul dalam statistik kemiskinan, namun absen dari kebijakan yang benar-benar transformatif.

Penelitian ini berangkat dari sebuah realitas yang sekaligus menjadi anomali dan harapan: di Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, sebuah inovasi kebijakan lokal telah hadir untuk menjawab keterpurukan multidimensi tersebut. Kepala desa perempuan, melalui otoritas formal pemerintahan desa, mentransformasikan nilai-nilai Islam menjadi kebijakan publik yang konkret, sebuah praktik yang dalam diskursus akademik dapat dikategorikan sebagai dakwah struktural. Program Kembang Jayanti, yang lahir dari persinggungan antara otoritas formal dan nilai dakwah, menjadi titik fokus penelitian ini sebagai kasus yang kaya dimensi dan belum terjamah secara akademik.

Kerangka Ideal, Kondisi Realitas, dan Celah (Gap) Penelitian

Sebelum masuk pada pemaparan tiga lapis (makro, meso, mikro) di bawah, kesenjangan yang menjadi pijakan penelitian ini disarikan terlebih dahulu ke dalam struktur ideal–realitas–gap, agar logika keseluruhan latar belakang mudah ditelusuri sejak awal.

Kerangka Ideal. Secara doktrinal, Islam menyediakan instrumen redistribusi—kafalah (tanggung jawab sosial kolektif), zakat, infak, dan qardh hasan—yang idealnya, bila diimplementasikan secara sistematis dan struktural,

mampu memberdayakan kelompok rentan seperti janda usia produktif secara holistik: material, sosial, dan spiritual sekaligus, bukan sekadar filantropi karitatif yang sporadis. Secara regulatif, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa idealnya memberi pemerintah desa kewenangan dan sumber daya (Dana Desa) yang memadai untuk merancang kebijakan pemberdayaan berbasis nilai-nilai lokal yang responsif terhadap kebutuhan riil warganya. Secara akademik, teori dakwah struktural (Sulthon, 2003) mengidealkan transformasi nilai keislaman menjadi kebijakan formal sebagai jalan efektif untuk mengatasi kemiskinan struktural, sementara teori pemberdayaan transformatif (Sen-Nussbaum; Freire-Rowlands-Kabeer) mengidealkan pemberdayaan yang multidimensi dan mengubah relasi kuasa, bukan sekadar bantuan yang bersifat karitatif dan pasif.

Kondisi Realitas. Sesungguhnya, program bantuan sosial formal (seperti PKH dan BPNT) justru melupakan janda usia produktif yang mengalami deprivasi ganda, sehingga sebagian besar dari mereka—60,9 persen di Desa Ganjar Sabar, sebagaimana dipaparkan pada lapis mikro—terjerat bank emok, praktik berunsur riba yang justru bertentangan dengan doktrin yang semestinya melindungi mereka. Potensi zakat, kafalah, dan qardh hasan pada praktiknya sebagian besar masih terjebak dalam filantropi karitatif yang sporadis, belum bertransformasi menjadi kebijakan struktural yang berkelanjutan. Kewenangan desa pasca-UU Desa 2014 juga belum banyak dimanfaatkan secara sistematis untuk merancang kebijakan pemberdayaan berbasis nilai keislaman yang terdokumentasi secara akademik: kajian dakwah struktural yang ada berhenti pada level institusi supra-desa (Kementerian Agama, MUI, organisasi Islam nasional), sementara kajian pemberdayaan perempuan yang ada umumnya memisahkan dimensi keagamaan dari dimensi kelembagaan formal.

Celah (Gap). Kesenjangan antara ideal—instrumen keislaman dan kewenangan desa yang semestinya mampu menghasilkan pemberdayaan struktural holistik, terdokumentasi dan diteorikan secara akademik—dengan realitas—instrumen tersebut belum banyak diterjemahkan secara struktural di level desa, dan ketika hal itu memang terjadi, seperti pada kasus Kembang Jayanti, belum pernah didokumentasikan atau dianalisis secara akademik—itulah yang menjadi pijakan

penelitian ini. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mendokumentasikan dan menganalisis secara sistematis kasus Kelompok Usaha Bersama Kembang Jayanti sebagai wujud konkret dakwah struktural di level pemerintah desa, sebagaimana dielaborasi lebih rinci melalui tiga lapis analisis dan pernyataan tipologi gap pada subbab berikut.

Untuk membangun justifikasi penelitian yang kokoh dan argumentatif, latar belakang ini disajikan dalam tiga lapis analisis yang saling menguatkan: lapis makro yang memetakan fenomena kemiskinan struktural perempuan kepala keluarga dalam konteks global dan nasional; lapis meso yang menguraikan kondisi spesifik Kabupaten Bandung dan Jawa Barat termasuk fenomena bank emok sebagai simptom kegagalan sistem keuangan formal; serta lapis mikro yang mendeskripsikan realitas Desa Ganjar Sabar sebagai lokus empiris sekaligus mengidentifikasi kekosongan akademik yang hendak diisi penelitian ini.

1. Lapis Makro: Kemiskinan Struktural Perempuan Kepala Keluarga dalam Perspektif Global dan Nasional

Pada skala global, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa perempuan merupakan kelompok yang secara struktural paling terdampak oleh kemiskinan multidimensi. UN Women (2020)¹ Melaporkan bahwa dari total populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di dunia, perempuan usia kerja (25–34 tahun) berada 25 persen lebih banyak dibandingkan laki-laki pada rentang usia yang sama. Kesenjangan ini bukan fenomena alamiah ia merupakan produk dari sistem yang secara sistematis membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pasar kerja, kredit formal, dan perlindungan sosial².

Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2015–2030, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan SDG ke-5 yang secara eksplisit menetapkan target: mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia;

¹ UN Women, *Progress of the World's Women 2019–2020: Families in a Changing World* (New York: UN Women, 2020), 160.

² N. Kabeer, "Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," dalam *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, ed. A. Sisask (Stockholm: SIDA, 2001), 17–54.

menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; dan memastikan partisipasi penuh serta kesempatan yang setara dalam kepemimpinan di semua tingkatan ³. Namun demikian, laporan *Voluntary National Reviews* (VNR) Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa pencapaian SDG 5 masih jauh dari target, khususnya pada indikator pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan di mana akses terhadap layanan keuangan, kepemilikan aset produktif, dan partisipasi dalam pasar kerja formal masih sangat rendah dibandingkan rata-rata nasional ⁴.

Dalam kerangka analisis gender dan pembangunan, Buvinic dan Gupta (1997)⁵ Telah ditunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan secara konsisten berada pada strata ekonomi terendah di negara-negara berkembang. Fenomena ini yang kemudian dikenal dengan konsep "feminisasi kemiskinan" yang dipopulerkan oleh Pearce⁶ memiliki karakteristik tersendiri: bukan sekadar kekurangan materi, melainkan juga deprivasi kapabilitas ⁷ Yang mencakup keterbatasan dalam kebebasan memilih, kebebasan bergerak, dan kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks Asia Tenggara, perbandingan lintas negara memberikan perspektif yang memperkaya analisis. Studi komparatif yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2021)⁸ menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat feminisasi kemiskinan tinggi umumnya memiliki karakteristik: (1) sistem jaminan sosial yang lemah dan tidak mencakup rumah tangga informal; (2) akses kredit mikro yang terbatas dan tidak terjangkau bagi perempuan tanpa agunan; (3) norma budaya patriarkal yang membatasi mobilitas dan otonomi ekonomi perempuan; serta (4) ketiadaan mekanisme kelembagaan lokal yang mampu menjembatani

³ United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: United Nations, 2015), 60.

⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Indonesia Voluntary National Review 2021: Sustainable Development Goals* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2021), 68.

⁵ M. Buvinic dan G. R. Gupta, "Female-Headed Households and Female-Maintained Families: Are They Worth Targeting to Reduce Poverty in Developing Countries?" *Economic Development and Cultural Change* 45, no. 2 (1997): 259–280.

⁶ D. Pearce, "The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare," *Urban and Social Change Review* 11, no. 1–2 (1978): 28–36.

⁷ A. Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 99.

⁸ Asian Development Bank, *Key Indicators for Asia and the Pacific 2021* (Manila: ADB, 2021), 56.

antara nilai-nilai komunitas dengan kebutuhan pemberdayaan yang bersifat modern dan transformatif. Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan Jawa Barat, menampilkan keempat karakteristik tersebut secara simultan, sehingga menjadi konteks yang sangat relevan untuk kajian inovasi pemberdayaan berbasis komunitas.

Dari perspektif teori kapabilitas (*capability approach*) yang dikembangkan oleh Sen⁹ dan dioperasionalisasikan lebih lanjut oleh Nussbaum¹⁰ Melalui "Central Human Capabilities", kemiskinan perempuan kepala keluarga bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan deprivasi multidimensi terhadap kapabilitas-kapabilitas esensial: kapabilitas untuk memperoleh kesehatan fisik yang layak; kapabilitas untuk mengakses pendidikan dan pengembangan akal budi; kapabilitas untuk mengontrol lingkungan material melalui kepemilikan properti; kapabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa rasa malu dan terisolasi; serta kapabilitas untuk hidup dengan rasa hormat diri yang utuh. Nussbaum secara tegas menyatakan bahwa masyarakat yang mengabaikan kapabilitas warganya, terutama perempuannya, gagal memenuhi standar minimum keadilan sosial, betapapun tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicatatkan.¹¹

Perlu dicatat bahwa perspektif Islam tentang kemiskinan dan pemberdayaan memiliki kekhasan epistemologis yang membedakannya dari pendekatan pembangunan Barat konvensional. Jika Sen menempatkan kebebasan (*freedom*) sebagai tujuan akhir pembangunan, Islam menempatkan *falah*, keberhasilan di dunia dan akhirat sebagai tujuan tertinggi manusia, yang mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual secara simultan¹². Dalam kerangka ini, kemiskinan bukan sekadar kondisi material yang harus diatasi demi meningkatkan kualitas hidup duniawi, melainkan kondisi yang menghalangi manusia dari pencapaian

⁹A. Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 23.

¹⁰M. C. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 78.

¹¹*Ibid.*

¹²M. Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought, 2000), 7–9. Bandingkan dengan A. Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 44, yang menempatkan kebebasan sebagai tujuan pembangunan—berbeda dari *falah* dalam Islam yang mencakup dimensi ukhrawi.

falah. Ini merupakan isu yang memiliki dimensi keagamaan yang sangat dalam. Oleh karena itu, respons Islam terhadap kemiskinan harus bersifat holistik dan integratif: menyentuh kebutuhan material sekaligus membangun kapasitas spiritual, karena keduanya merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari kemanusiaan yang utuh dalam pandangan Islam.

Di Indonesia, potret kemiskinan perempuan kepala keluarga menampilkan dimensi yang lebih kompleks akibat persinggungan antara faktor struktural ekonomi dan faktor budaya serta keagamaan. Badan Pusat Statistik (2023)¹³ Mencatat bahwa 14,9 persen dari total 68,5 juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berada di kawasan pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga perempuan kepala keluarga di pedesaan mencapai 15,3 persen, lebih tinggi 2,4 poin persentase dibandingkan rata-rata nasional¹⁴.

Sebagian besar perempuan kepala keluarga di Indonesia adalah janda, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak¹⁵ Menunjukkan tren peningkatan angka perceraian yang signifikan dalam satu dekade terakhir, dengan total 516.334 putusan cerai yang dicatatkan sepanjang tahun 2022. Mayoritas perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat), dengan alasan utama berupa perselisihan yang terus-menerus, ketidakmampuan ekonomi suami, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pasca perceraian, perempuan, terutama di pedesaan, acap kali menanggung beban ekonomi keluarga sendirian, tanpa tabungan, tanpa keahlian formal, dan tanpa akses terhadap sistem perlindungan sosial yang memadai.

¹³Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (Jakarta: BPS RI, 2023).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan Indonesia 2022* (Jakarta: KPPPA RI, 2022).

Dalam perspektif teori kemiskinan struktural yang dikembangkan oleh Gans (1972)¹⁶ dan diperbarui oleh Massey (2007)¹⁷ kemiskinan bukanlah akibat dari kemalasan atau ketidakmampuan individu, melainkan merupakan produk dari struktur sosial yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi ketidaksetaraan. Bagi janda usia produktif di pedesaan, struktur ini berwajah berlapis: diskriminasi di pasar kerja¹⁸, pembatasan mobilitas berbasis norma gender lokal¹⁹, ketiadaan agunan yang dipersyaratkan lembaga keuangan formal²⁰ serta minimnya program perlindungan sosial yang responsif terhadap gender. Moser²¹ Dalam kerangka Gender Planning and Development, ditegaskan bahwa perempuan tidak hanya menanggung beban reproduksi (mengasuh keluarga), beban produktif (mencari nafkah), tetapi juga beban komunitas (partisipasi sosial). Triple burden ini menjadikan posisi mereka sangat rentan terhadap shock ekonomi.

Pada dimensi keagamaan, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sesungguhnya mengandung ajaran yang secara teologis mendorong perlindungan dan pemberdayaan kaum lemah, termasuk janda. Konsep kafalah (tanggung jawab sosial kolektif), zakat, infak, dan wakaf merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang, apabila diimplementasikan secara sistematis dan struktural, memiliki potensi besar untuk mereduksi kemiskinan perempuan²². Namun, potensi ini sebagian besar masih terjebak pada tataran filantropi karitatif yang sporadis dan belum bertransformasi menjadi kebijakan struktural yang berkelanjutan. Di sinilah terbuka celah konseptual dan empiris yang menjadi titik berangkat penelitian ini:

¹⁶ H. J. Gans, "The Positive Functions of Poverty," *American Journal of Sociology* 78, no. 2 (1972): 275–289.

¹⁷ D. S. Massey, *Categorically Unequal: The American Stratification System* (New York: Russell Sage Foundation, 2007).

¹⁸ R. Anker, *Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupations in the World* (Geneva: International Labour Organization, 1998).

¹⁹ C. O. N. Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* (London: Routledge, 1993).

²⁰ M. Yunus, *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty* (New York: PublicAffairs, 2003).

²¹ C. O. N. Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* (London: Routledge, 1993).

²² M. Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought, 2000); M. Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Societies* (Jeddah: Islamic Development Bank, 1997).

bagaimana nilai-nilai Islam dapat ditransformasikan menjadi instrumen kebijakan publik formal yang berdaya ubah secara struktural?

Di tingkat nasional, berbagai kebijakan pemerintah telah dirancang untuk menjawab persoalan kemiskinan perempuan kepala keluarga: Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin, termasuk janda; Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); serta program pemberdayaan usaha mikro berbasis komunitas. Namun evaluasi komprehensif SMERU Research Institute (2019)²³ menunjukkan bahwa program-program tersebut acapkali bersifat top-down dan kurang mengintegrasikan modal sosial serta nilai-nilai spiritual yang sesungguhnya menjadi kekuatan intrinsik komunitas Muslim pedesaan. Lebih jauh, orientasi program yang semata-mata materialistik, yang mengukur keberhasilan berdasarkan indikator pendapatan, konsumsi, dan kepemilikan aset, gagal menangkap dimensi nonmaterial yang tidak kalah pentingnya bagi kesejahteraan perempuan Muslim pedesaan. Di sinilah terdapat celah kebijakan yang signifikan: diperlukan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya menyentuh dimensi material, tetapi juga membangun kapasitas spiritual dan solidaritas sosial komunitas secara bersamaan, dan itulah yang coba dijawab oleh program Kembang Jayanti melalui pendekatan dakwah struktural.

2. Lapis Meso: Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan Fenomena Bank

Emok

Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, sebesar 49,2 juta jiwa menurut Sensus Penduduk 2020, sekaligus menjadi salah satu provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi secara absolut. Data Pengadilan Agama se-Jawa Barat mencatat lebih dari 120.000 putusan cerai per tahun dalam periode 2020–2022, dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur secara konsisten menempati posisi teratas²⁴. Tingginya angka perceraian ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah janda usia produktif yang harus menanggung beban ekonomi keluarga secara mandiri.

²³ SMERU Research Institute, *Evaluasi Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga di Indonesia: Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai* (Jakarta: SMERU, 2019).

²⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan 2022: Statistik Perkara Cerai Pengadilan Agama se-Indonesia* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2022).

Fenomena yang paling menonjol dalam konteks kemiskinan perempuan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung adalah maraknya praktik pinjaman informal yang dikenal secara lokal sebagai "bank emok." Istilah ini berasal dari kata "emok" dalam bahasa Sunda yang berarti duduk bersila, merujuk pada posisi duduk para penagih pinjaman yang mendatangi rumah-rumah peminjam setiap minggu untuk menagih cicilan. Bank emok merupakan bentuk kredit keliling yang beroperasi di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan karakteristik utama: tidak memerlukan agunan, pencairan cepat, namun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi berkisar antara 20–40 persen per bulan ²⁵.

Untuk memahami mekanisme bank emok secara lebih mendalam, penting untuk menganalisisnya dalam kerangka teori pasar keuangan yang tidak sempurna (imperfect financial markets). Stiglitz dan Weiss²⁶ dalam makalah landmark mereka tentang credit rationing menunjukkan bahwa dalam kondisi asimetri informasi di mana pemberi pinjaman tidak dapat secara sempurna menilai kelayakan kredit peminjam pasar kredit formal akan secara sistematis mengeksklusi kelompok yang dianggap berisiko tinggi, meskipun sesungguhnya kelompok tersebut memiliki kapasitas dan niat bayar yang baik. Janda usia produktif di pedesaan merupakan korban sempurna dari mekanisme credit rationing ini: ketiadaan riwayat kredit formal, ketiadaan agunan aset tetap, dan ketiadaan penghasilan tetap yang dapat diverifikasi membuat mereka tidak dapat mengakses kredit bank konvensional meskipun riset Yunus²⁷ dan berbagai studi tentang microfinance menunjukkan bahwa kelompok perempuan miskin justru memiliki tingkat pembayaran yang sangat tinggi ketika diberi akses dengan desain produk yang tepat.

²⁵ T. Budiarto, "Fenomena Bank Emok di Jawa Barat: Antara Kebutuhan dan Eksploitasi," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 23, no. 2 (2019): 211–224; Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Inklusif Indonesia 2021* (Jakarta: OJK, 2021).

²⁶ J. E. Stiglitz dan A. Weiss, "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information," *American Economic Review* 71, no. 3 (1981): 393–410.

²⁷ M. Yunus, *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty* (New York: PublicAffairs, 2003), 77.

Kegagalan pasar keuangan formal dalam melayani kelompok rentan menghasilkan apa yang oleh North²⁸ disebut sebagai "vakum kelembagaan" (*institutional void*) suatu kondisi di mana aturan-aturan formal gagal menyediakan kerangka yang memadai bagi transaksi ekonomi di tingkat akar rumput, sehingga masyarakat mengembangkan aturan-aturan informal sendiri untuk memfasilitasi pertukaran ekonomi. Bank emok adalah contoh sempurna dari fenomena ini: ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem keuangan formal dengan menyediakan akses kredit yang cepat dan tanpa agunan namun dengan harga eksploitatif. Selama vakum kelembagaan ini tidak diisi oleh alternatif yang lebih baik dari dalam komunitas sendiri, bank emok akan terus bertahan dan berkembang, berapapun besarnya upaya regulasi yang dilakukan dari luar sistem.

Dari perspektif syariah Islam, praktik bank emok mengandung unsur riba yang secara tegas dilarang dalam Al Quran (QS. Al Baqarah: 275-279). Lebih dari sekadar larangan teologis, pelarangan riba dalam Islam memiliki dimensi sosial ekonomi yang rasional: sistem bunga berbunga menciptakan mekanisme transfer kekayaan dari kelompok miskin kepada kelompok kaya secara sistematis, memperdalam ketimpangan, dan menghancurkan basis modal komunitas²⁹. Bagi masyarakat Muslim pedesaan seperti di Desa Ganjar Sabar yang memiliki kesadaran keagamaan tinggi, keterlibatan dalam bank emok sering kali menciptakan disonansi kognitif yang mendalam mereka tahu bahwa praktik tersebut bertentangan dengan agama, namun terasa tidak ada pilihan lain. Kondisi ini terjebak antara kebutuhan ekonomi dan larangan agama menjadi sumber tekanan psikologis dan spiritual yang turut memperburuk kondisi ketahanan sosial.

Respons pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap fenomena bank emok patut dicatat sebagai konteks kebijakan yang relevan. Gubernur Jawa Barat pada tahun 2019 menerbitkan kebijakan program "Kredit Mesra" (Merakyat dan Sejahtera) melalui Bank BJB sebagai alternatif kredit murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun evaluasi implementasi menunjukkan bahwa

²⁸D. C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

²⁹ M. Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought, 2000).

program ini masih menghadapi kendala aksesibilitas di lapangan: persyaratan administrasi yang relatif kompleks, jangkauan jaringan yang terbatas di daerah pedesaan terpencil, dan ketiadaan pendampingan yang memadai pasca pencairan³⁰. Temuan ini memperkuat argumen teoretis bahwa solusi untuk fenomena bank emok tidak dapat bersifat top down dan terpusat semata, melainkan harus dibangun dari level komunitas paling akar di mana trust, hubungan personal, dan nilai-nilai lokal menjadi fondasi yang jauh lebih kokoh.

Kabupaten Bandung sendiri, sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Barat dengan luas wilayah 1.762,39 km², memiliki 270 desa dan 9 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung (2023)³¹, tingkat kemiskinan di kabupaten ini mencapai 7,94 persen dengan total penduduk miskin sebesar 320.450 jiwa. Di wilayah pedesaan khususnya di kecamatan-kecamatan yang bukan merupakan pusat industri angka kemiskinan cenderung lebih tinggi, didominasi oleh rumah tangga perempuan kepala keluarga yang bergantung pada sektor pertanian dan usaha mikro informal. Kecamatan Nagreg, tempat lokasi penelitian berada, termasuk dalam zona pedesaan dengan karakteristik tersebut.

3. Lapis Mikro: Desa Ganjar Sabar dan Lahirnya Program Kembang Jayanti sebagai Dakwah Struktural

Desa Ganjar Sabar terletak di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki luas wilayah 1.247 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 12.847 jiwa (tahun 2023), yang tersebar di 17 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT). Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian (khususnya sayuran dan tembakau), buruh pabrik di kawasan industri sekitar Nagreg, dan perdagangan kecil-kecilan. Secara keagamaan, hampir 99 persen penduduk desa beragama Islam dengan tradisi pesantren yang kuat terdapat tiga pesantren dan dua majlis taklim besar yang aktif berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

³⁰ Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, *Laporan Evaluasi Program Kredit Mesra Tahun 2020–2021* (Bandung: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, 2021).

³¹BPS Kabupaten Bandung, *Kabupaten Bandung dalam Angka 2023* (Bandung: BPS Kabupaten Bandung, 2023).

Data Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Ganjar Sabar tahun 2024 mencatat keberadaan 368 orang janda yang tersebar di 17 RW, terdiri dari: 60 janda muda (di bawah usia 25 tahun), 110 janda usia produktif (25–55 tahun), dan 198 janda lansia (di atas 55 tahun). Distribusi ini menggambarkan bahwa hampir 30 persen dari populasi janda di desa ini berada dalam usia produktif sebuah proporsi yang signifikan dan mendesak untuk ditangani melalui intervensi pemberdayaan yang sistematis, bukan sekadar bantuan sosial paliatif.

Perlu diperjelas sejak awal cakupan subjek penelitian ini: istilah "janda usia produktif" yang digunakan sepanjang disertasi ini merujuk pada sebuah KATEGORI SOSIAL—yakni seluruh 110 perempuan berstatus janda berusia 25–55 tahun di Desa Ganjar Sabar sebagaimana dipaparkan di atas—bukan satu individu janda tertentu. Penelitian ini adalah studi tentang PARA JANDA (jamak) sebagai kelompok sasaran program dan sebagai subjek kolektif yang dianalisis melalui suara dan pengalaman banyak informan individual (dipaparkan pada Bab IV.B), bukan studi kasus biografis atas satu orang janda. Ketika disertasi ini pada bagian tertentu menyoroti pengalaman satu informan secara mendalam (misalnya Ketua Kelompok Usaha Bersama, Yuyun), hal itu dilakukan sebagai ilustrasi representatif dari pola yang lebih luas yang ditemukan pada kelompok, bukan sebagai fokus tunggal penelitian.

Kelompok janda usia produktif di Desa Ganjar Sabar menghadapi realitas yang sangat kompleks. Observasi lapangan dan wawancara pendahuluan (pra penelitian, Januari 2024) mengungkapkan pola kemiskinan yang bersifat multiplikatif: rata-rata dari mereka hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah pertama atau lebih rendah; sebagian besar menggantungkan hidup pada pekerjaan buruh serabutan dengan penghasilan tidak menentu; dan hampir tidak ada yang memiliki rekening tabungan di bank formal. Yang paling kritis, sebanyak 67 dari 110 janda usia produktif atau sekitar 60,9 persen diketahui memiliki keterikatan utang dengan praktisi bank emok, dengan nilai pinjaman rata-rata Rp2,5

juta hingga Rp7 juta dan cicilan mingguan yang mencapai 25 35 persen dari nilai pokok pinjaman ³².

Kehadiran program Kembang Jayanti di Desa Ganjar Sabar perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas: tren global menuju "localization of development" dan penguatan peran pemerintah desa sebagai aktor pembangunan yang otonom pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan yang belum pernah ada sebelumnya kepada desa: alokasi Dana Desa yang langsung dari APBN, kewenangan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal, serta hak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan berbagai kelembagaan ekonomi komunitas. Dalam konteks ini, tindakan Kepala Desa Siti Hasanah menerbitkan SK Kembang Jayanti dan mengalokasikan Dana Desa untuk program pemberdayaan janda usia produktif merupakan ekspresi optimal dari semangat desentralisasi yang dikandung UU Desa yakni pembangunan yang dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh dan untuk komunitas lokal itu sendiri.

Dari perspektif gender dan tata kelola, fakta bahwa program Kembang Jayanti diprakarsai oleh kepala desa perempuan (Siti Hasanah) memiliki signifikansi akademik tersendiri. Berbagai studi tentang kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan lokal, termasuk studi Chattopadhyay dan Duflo³³ tentang dampak kebijakan reservasi kepemimpinan perempuan di desa-desa India, menunjukkan bahwa pemimpin perempuan secara konsisten lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Pengalaman Desa Ganjar Sabar memberikan bukti empiris tambahan yang memperkuat temuan ini dalam konteks Indonesia, dan secara khusus menambahkan dimensi yang belum dieksplorasi: bagaimana kepemimpinan perempuan yang

³² Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Ganjar Sabar, *Data Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Ganjar Sabar Tahun 2024* (Bandung: Pemerintah Desa Ganjar Sabar, 2024), dokumen internal pra-penelitian, Januari 2024.

³³R. Chattopadhyay dan E. Duflo, "Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India," *Econometrica* 72, no. 5 (2004): 1409–1443.

berakar pada identitas keislaman yang kuat mentransformasikan nilai-nilai dakwah menjadi kebijakan publik yang konkret dan berdampak nyata.

Realisasi dari visi tersebut adalah penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Ganjar Sabar Nomor 141/SK-23/Des/XII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Kembang Jayanti—skema pemberdayaan ekonomi kelompok yang secara nasional lazim dikenal dengan akronim KUBE, mengacu pada program pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat miskin/rentan yang diinisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nama "Kembang Jayanti" dipilih secara simbolik, mengandung makna "bunga kejayaan", sebuah metafora tentang potensi dan keindahan yang masih bisa mekar dari kehidupan yang tampak layu. Program ini dirancang sebagai wahana dakwah struktural yang mengintegrasikan tiga dimensi pemberdayaan secara simultan: spiritual (pembinaan nilai-nilai keislaman, penguatan religiusitas, dan pemaknaan hidup), sosial (pembangunan solidaritas komunitas, penghapusan stigma, dan pembentukan jaringan saling dukung), serta ekonomi (pelatihan kewirausahaan, akses modal bergulir berbasis syariah, dan pendampingan usaha mikro).

Salah satu aspek paling inovatif dari program Kembang Jayanti adalah mekanisme modal bergulir berbasis qardh hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang dilandaskan pada prinsip syariah. Dalam literatur keuangan Islam, qardh hasan merupakan salah satu instrumen keuangan sosial yang paling dianjurkan dalam Al-Qur'an karena mencerminkan solidaritas sosial tanpa mengandung unsur eksploitasi finansial. Berbeda dari sistem zakat (yang bersifat hibah nonrefundable) dan dari kredit komersial berbasis bunga, qardh hasan menciptakan mekanisme sirkulasi modal yang berkelanjutan: dana yang dipinjamkan dikembalikan ke pool komunal untuk kemudian dapat dipinjamkan kepada anggota lain, sehingga menciptakan efek multiplier sosial yang terus berkembang. Keunikan mekanisme ini dalam konteks program Kembang Jayanti adalah bahwa ia bukan sekadar instrumen keuangan; ia merupakan instrumen dakwah yang bersifat struktural, karena menggantikan secara konkret mekanisme riba (bank emok) dengan mekanisme yang secara teologis dibenarkan dan secara sosial lebih adil.

Yang menjadikan Program Kembang Jayanti unik secara akademik adalah posisinya sebagai contoh nyata dakwah struktural yang diimplementasikan melalui instrumen formal pemerintahan desa. Dalam literatur dakwah Indonesia, dakwah struktural umumnya dikonseptualisasikan dalam konteks regulasi supradesa atau aktivitas lembaga dakwah formal. Belum ada kajian yang mendokumentasikan dan menganalisis secara sistematis bagaimana nilai-nilai dakwah ditransformasikan menjadi kebijakan operasional pemerintah desa, institusi negara terkecil yang justru paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Karakteristik inilah yang dielaborasi secara sistematis sebagai kesenjangan akademik dan novelty penelitian pada subbab berikut.

4. Kesenjangan Akademik dan Posisi Penelitian

Pernyataan Gap dan Novelty (ringkas). Sebelum uraian rinci berikut, kesenjangan akademik yang menjadi pijakan penelitian ini dinyatakan secara eksplisit pada empat tipe sekaligus. *Gap teoretis*: belum ada model konseptual yang mengintegrasikan teori dakwah struktural, strukturasi Giddens, dan ketahanan sosial ekonomi empat dimensi (termasuk dimensi spiritual yang absen dari kerangka ketahanan konvensional) dalam satu kerangka analisis. *Gap empiris*: pemerintah desa sebagai aktor dakwah struktural—berbeda dari lembaga dakwah non-pemerintah, pesantren, atau organisasi Islam nasional yang selama ini menjadi fokus kajian dakwah struktural—belum pernah didokumentasikan secara sistematis. *Gap metodologis*: desain studi kasus instrumental yang menggabungkan analisis kebijakan formal desa dengan pengalaman subjektif penerima manfaat pada level dakwah struktural masih jarang digunakan dalam kajian dakwah di Indonesia. *Gap gender*: integrasi eksplisit perspektif Gender and Development dan interseksionalitas ke dalam kajian dakwah struktural di Indonesia nyaris tidak ada. Novelty (kebaruan) utama penelitian ini dapat dinyatakan dalam satu kalimat: penelitian ini adalah kajian pertama yang mendokumentasikan pemerintah desa sebagai aktor dakwah struktural dalam pemberdayaan janda usia produktif, sekaligus mengembangkan dua kontribusi konseptual baru—Model Dakwah Esoteris dan Matriks Ketahanan Sosial Ekonomi Timpang—sebagai hasil sintesis antara teori yang telah ada dengan temuan empiris baru dari kasus Kelompok Usaha

Bersama Kembang Jayanti (elaborasi lebih rinci pada sub-bab Penelitian Terdahulu, poin Originalitas Penelitian, Bab I, dan pada Implikasi Teoretis, Bab V).

Meskipun kajian tentang kemiskinan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan dakwah masing-masing telah memiliki literatur yang cukup memadai, penelusuran sistematis terhadap basis data akademik SCOPUS, Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA menunjukkan bahwa persilangan antara ketiganya, khususnya dalam konteks pemerintah desa sebagai aktor dakwah struktural, hampir tidak ditangani dalam penelitian yang ada. Ini adalah kesenjangan akademik (*academic gap*) yang bersifat substantif, bukan sekadar kekurangan studi kasus.

Kajian-kajian tentang dakwah struktural yang ada menunjukkan pola keterbatasan yang serupa satu sama lain: Sulthon³⁴ membahasnya secara normatif-preskriptif tanpa menyentuh implementasi pada level pemerintahan desa, sementara Aziz³⁵ Beroperasi pada level konseptual yang serupa, keduanya berfokus pada institusi dakwah formal seperti Kementerian Agama, MUI, atau organisasi Islam nasional (Muhammadiyah, NU)—keduanya belum menjangkau pemerintah desa sebagai aktor dakwah struktural yang berdiri sendiri. Sementara itu, kajian tentang pemberdayaan perempuan berbasis nilai keislaman di Indonesia pada umumnya berfokus pada lembaga dakwah nonpemerintah, kelompok usaha bersama di wilayah perkotaan, atau pemberdayaan berbasis pesantren, tanpa menjangkau institusi pemerintahan formal di tingkat desa. Kajian tersebut juga cenderung memisahkan dimensi keagamaan dari dimensi kelembagaan formal, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak sepenuhnya relevan bagi masyarakat Muslim pedesaan yang religiusitasnya merupakan identitas inti.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui tiga kontribusi spesifik yang dapat diidentifikasi sejak awal. Pertama, kontribusi empiris: menyediakan dokumentasi yang sistematis dan mendalam tentang praktik dakwah struktural yang diimplementasikan melalui pemerintah desa, suatu fenomena empiris yang nyata

³⁴M. Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (Semarang: Walisongo Press, 2003), 95.

³⁵Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

ada, namun belum pernah dikaji secara akademik. Kedua, kontribusi teoretis: mengembangkan model konseptual baru (MKDSD) yang mengintegrasikan teori dakwah struktural, teori pemberdayaan, dan teori ketahanan sosial dalam satu kerangka analisis yang koheren dan operasional. Ketiga, kontribusi metodologis: mendemonstrasikan penggunaan desain studi kasus instrumental yang rigor dalam kajian dakwah empiris, memperluas repertoar metodologis yang tersedia bagi peneliti di bidang ilmu dakwah.

Berdasarkan pemaparan tiga lapis dan identifikasi kesenjangan akademik tersebut, penelitian disertasi ini hadir dengan urgensi yang berlapis dan saling memperkuat, sebagaimana diuraikan berikut—bukan sekadar tiga label, melainkan tiga argumen yang masing-masing berdiri di atas fakta yang telah dipaparkan pada lapis-lapis sebelumnya.

Urgensi empiris bersifat mendesak dan terbatas waktu. Sebagaimana dipaparkan pada lapis mikro, 67 dari 110 janda usia produktif di Desa Ganjar Sabar (60,9 persen) telah terjatuh bank emok dengan cicilan mingguan mencapai 25–35 persen dari nilai pokok pinjaman—kondisi yang, tanpa dokumentasi dan analisis akademik, berisiko terus mereproduksi diri tanpa pembelajaran kebijakan yang dapat direplikasi ke desa lain dengan persoalan serupa. Menunda dokumentasi akademik atas program Kembang Jayanti berarti membiarkan preseden kebijakan lokal yang potensial ini tidak terverifikasi secara ilmiah, tepat pada saat kelompok yang dilayaninya berada pada titik kerentanan tertinggi.

Urgensi akademik tidak sekadar mengisi kekosongan konseptual, melainkan juga menjawab kebutuhan analitis yang lebih mendasar. Literatur dakwah struktural yang ada (Sulthon; Aziz) beroperasi pada level institusi supra-desi dan belum memiliki kerangka untuk memahami dakwah struktural pada level pemerintahan terkecil, sementara literatur pemberdayaan perempuan berbasis nilai keislaman yang ada pada umumnya memisahkan dimensi keagamaan dari dimensi kelembagaan secara formal. Tanpa penelitian ini, persilangan kedua bidang pada level pemerintah desa akan terus menjadi titik buta dalam peta keilmuan dakwah dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, sebagaimana dielaborasi lebih rinci pada subbab berikut.

Urgensi kebijakan bersandar pada momentum regulasi yang sedang berlangsung: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan luas kepada puluhan ribu desa di Indonesia untuk merancang kebijakan pemberdayaan berbasis nilai lokal, namun tanpa model replikasi yang teruji secara akademik seperti yang ditawarkan penelitian ini, desa-desa lain dengan kondisi serupa—proporsi janda usia produktif tinggi, jeratan rentenir informal, basis keagamaan yang kuat—berisiko mengulang inovasi kebijakan dari titik nol tanpa memanfaatkan pembelajaran yang sesungguhnya sudah tersedia.

5. Kajian Gender sebagai Dimensi Analisis yang Tidak Terpisahkan

Meskipun penelitian ini berangkat dari bingkai keilmuan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, kajian gender merupakan dimensi analisis yang tidak dapat dipisahkan dari substansi penelitian. Subjek utama penelitian ini adalah perempuan janda usia produktif yang menghadapi kemiskinan berlapis bukan semata-mata karena kondisi ekonomi, melainkan secara mendasar karena konstruksi gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur sosial, ekonomi, dan bahkan keagamaan. Mengabaikan dimensi gender berarti kehilangan separuh dari penjelasan tentang mengapa kemiskinan yang diteliti terjadi serta bagaimana program Kembang Jayanti bekerja untuk mengatasinya.

Secara konseptual, penelitian ini mengadopsi perspektif Gender and Development (GAD) sebagaimana dikembangkan oleh Moser dan Kabeer (1994, 2001), yang memandang gender bukan sekadar variabel biologis, melainkan sebagai sistem relasi kuasa yang dikonstruksi secara sosial dan termanifestasi dalam institusi, kebijakan, serta praktik sehari-hari. Berbeda dari pendekatan Women in Development (WID) yang cenderung melihat perempuan sebagai penerima manfaat pasif pembangunan, pendekatan GAD menempatkan perempuan sebagai agen aktif perubahan sosial, dengan kapasitas yang dibentuk sekaligus dibatasi oleh relasi gender yang berlaku dalam konteksnya. Dalam penelitian ini, perspektif GAD digunakan untuk menganalisis bagaimana program Kembang Jayanti tidak sekadar memberikan akses ekonomi kepada perempuan, melainkan secara aktif

mentransformasi relasi gender di tingkat rumah tangga, komunitas, dan pemerintahan desa.³⁶

Dalam konteks Indonesia, relasi gender tidak dapat dianalisis secara memadai tanpa mempertimbangkan persinggungannya dengan agama, kelas, dan lokasi geografis sebuah pendekatan yang dalam kajian gender kontemporer dikenal sebagai interseksionalitas³⁷. Perempuan janda di Desa Ganjar Sabar tidak sekadar menghadapi subordinasi berbasis gender; mereka menghadapi ketidaksetaraan yang berlapis karena status janda yang masih mengandung stigma sosial, karena kemiskinan yang mempersempit pilihan, karena lokasi di daerah pedesaan yang membatasi akses terhadap layanan, dan karena pemahaman agama tertentu yang kadang kala dijadikan legitimasi pembatasan peran perempuan. Penelitian ini peka terhadap kompleksitas berlapis ini dan menggunakannya sebagai lensa analitis untuk memahami mengapa program Kembang Jayanti dirancang sebagaimana adanya dan mengapa ia bekerja sebagaimana ia bekerja.

Kajian gender dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui tiga dimensi yang saling melengkapi. **Pertama, dimensi struktural:** bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan secara sistematis mereproduksi ketidaksetaraan gender yang membuat perempuan janda lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan laki-laki dalam kondisi serupa. Pada dimensi ini, penelitian ini menggunakan kerangka triple burden Moser (1993) yang menunjukkan beban ganda dan berlapis yang ditanggung perempuan sebagai pekerja produktif, pengasuh keluarga, dan aktor komunitas secara bersamaan tanpa kompensasi memadai dari sistem. **Kedua, dimensi relasional:** bagaimana program Kembang Jayanti mengubah dinamika relasi gender di tingkat interpersonal, khususnya bagaimana partisipasi dalam program tersebut memengaruhi posisi tawar perempuan dalam keluarga besar, jaringan sosial, dan komunitas. Rowlands³⁸ menegaskan bahwa pemberdayaan

³⁶C. O. N. Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* (London: Routledge, 1993).

³⁷ K. Crenshaw, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics," *University of Chicago Legal Forum* 1989, no. 1 (1989): 139–167.

³⁸J. Rowlands, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras* (Oxford: Oxfam, 1997), 115.

sejati harus melampaui dimensi personal dan menyentuh transformasi relasi kuasa di semua level. **Ketiga, dimensi representasi dan suara:** bagaimana perempuan sebagai subjek penelitian diberi ruang untuk menyuarakan pengalaman, perspektif, dan aspirasi mereka sendiri, bukan melalui representasi pihak lain. Dimensi ini memiliki implikasi metodologis yang signifikan: penelitian ini mengutamakan wawancara mendalam dengan para janda sebagai informan utama, bukan sekadar sebagai data pelengkap.

Penting untuk menempatkan kajian gender dalam penelitian ini dalam relasi dialogis dengan perspektif Islam, bukan dalam relasi oposisional. Terdapat tensi konseptual yang produktif antara teori-teori gender yang berkembang dalam tradisi intelektual Barat sekuler dan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas Muslim yang menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini tidak mengadopsi posisi bahwa nilai-nilai Islam inheren bertentangan dengan kesetaraan gender; sebaliknya, ia mengambil posisi bahwa terdapat keragaman tafsir dalam tradisi Islam tentang relasi gender, dan bahwa program Kembang Jayanti justru bekerja dengan mengaktifkan tafsir-tafsir Islam yang berpihak pada martabat dan kapabilitas perempuan. Husein Muhammad³⁹, Amina Wadud (1999)⁴⁰ dan Siti Musdah Mulia⁴¹ Telah ditunjukkan bahwa Islam, apabila ditafsirkan secara kontekstual dan dengan perspektif keadilan, justru mengandung prinsip-prinsip yang sangat kuat untuk mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Posisi inilah yang menjadi landasan kajian gender dalam penelitian ini: bukan menolak nilai keagamaan demi kesetaraan gender, melainkan menggali dimensi keadilan gender yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri.

Implikasi kajian gender terhadap kerangka penelitian ini dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Dalam *rumusan masalah*, dimensi gender memperkuat relevansi pertanyaan tentang proses pemberdayaan (RQ 2) dan dampak terhadap kesejahteraan (RQ 4) karena kedua pertanyaan tersebut pada dasarnya menanyakan

³⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 115.

⁴⁰ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, edisi ke-2 (New York: Oxford University Press, 1999), 231.

⁴¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44.

apakah dan bagaimana program Kembang Jayanti berhasil menggeser posisi perempuan dalam struktur sosial yang tidak adil. Dalam *kerangka analisis*, perspektif gender memperkaya model empat simpul dengan menambahkan lensa kritis: kondisi awal (Simpul I) dipahami tidak hanya sebagai kemiskinan material, tetapi juga sebagai kemiskinan yang dikonstruksi gender; intervensi (Simpul II) dipahami tidak hanya sebagai kebijakan desa, tetapi juga sebagai kebijakan responsif gender yang dimungkinkan oleh kepemimpinan perempuan; dan output (Simpul IV) dipahami tidak hanya sebagai ketahanan sosial ekonomi, tetapi juga sebagai transformasi relasi gender yang lebih berkeadilan. Dalam *metodologi*, perspektif gender menuntut desain penelitian yang responsif gender: pemilihan informan yang memastikan suara perempuan menjadi sumber utama data, perhatian terhadap dinamika kuasa dalam sesi wawancara, serta sensitivitas terhadap topik-topik sensitif yang menyangkut stigma, trauma, dan relasi personal yang mungkin muncul dalam proses pengumpulan data.

Penambahan kajian gender ini juga memiliki implikasi terhadap identifikasi kesenjangan akademik. Sebagaimana telah diidentifikasi dalam tinjauan klaster penelitian terdahulu, kajian tentang pemberdayaan perempuan Muslim di pedesaan Indonesia yang mengintegrasikan perspektif gender dengan dimensi dakwah struktural dan pemerintahan desa nyaris tidak ada. Kajian gender dalam literatur dakwah Indonesia umumnya masih bersifat normatif (membahas hak-hak perempuan dalam perspektif fikih), tanpa cukup menganalisis bagaimana ketidaksetaraan gender termanifestasi dan direproduksi dalam praktik kelembagaan serta kebijakan lokal. Dengan secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender sebagai dimensi analisis, penelitian ini memperkuat novelty dan mempertegas relevansi akademiknya bagi dua komunitas keilmuan sekaligus: ilmu dakwah dan kajian gender dalam konteks Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Perlu ditegaskan sejak awal perbedaan fungsi antara latar belakang dan rumusan masalah, agar keduanya tidak dibaca sebagai pengulangan. Latar belakang pada subbab sebelumnya menjelaskan *mengapa* penelitian ini penting dan mendesak untuk dilakukan—melalui pemaparan fenomena pada tiga lapis (makro,

meso, mikro) serta kesenjangan akademik yang teridentifikasi melalui penelusuran literatur. Rumusan masalah berikut memiliki fungsi yang berbeda: menjelaskan secara presisi *isu spesifik apa* yang akan dibahas dan dijawab oleh penelitian ini—batas dan substansi persoalan yang kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang operasional dan dapat dijawab secara empiris. Dengan kata lain, latar belakang berorientasi pada justifikasi (mengapa penelitian ini perlu ada), sedangkan rumusan masalah berorientasi pada definisi isu (apa yang secara spesifik akan diteliti).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan substantif yang saling berkaitan dan membentuk kompleksitas yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial.

Identifikasi masalah berikut berfungsi sebagai peta persoalan yang menunjukkan cakupan, kedalaman, dan keterkaitan antardimensi masalah yang dihadapi, sebelum peneliti menetapkan fokus penelitian yang lebih tertentu melalui rumusan masalah.

Pertama, keterpurukan multidimensi janda usia produktif di Desa Ganjar Sabar bersifat saling memperparah (*vicious cycle*). Kemiskinan material membatasi akses terhadap pendidikan dan pelatihan; ketiadaan keterampilan membatasi kemampuan untuk meningkatkan pendapatan; isolasi sosial akibat stigma "janda" membatasi jaringan dukungan yang tersedia; sementara itu, keterpurukan ekonomi memperdalam isolasi sosial dan merusak kepercayaan diri. Lingkaran kemiskinan ini tidak dapat diputus hanya dengan intervensi ekonomi atau sosial semata, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang menyentuh dimensi spiritual, sosial, dan material secara bersamaan.

Kedua, fenomena bank emok telah berkembang menjadi mekanisme struktural yang memperburuk kemiskinan, bukan sekadar pilihan rasional individu yang dapat diatasi dengan edukasi keuangan sederhana. Bank emok hadir untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem keuangan formal, dan selama kekosongan itu tidak terisi oleh alternatif yang aksesibel, terjangkau, dan berbasis nilai lokal, fenomena ini akan terus berlangsung. Kajian OJK memperkirakan bahwa praktik pinjaman informal berbunga tinggi menyerap sedikitnya 40 persen dari penghasilan bulanan peminjam dalam bentuk cicilan, sehingga menjadi salah

satu faktor terbesar yang menghambat akumulasi modal pada kelompok ekonomi bawah.⁴²

Ketiga, terdapat kesenjangan konseptual dan praktis antara pendekatan pemberdayaan perempuan yang dominan, yang cenderung memisahkan dimensi spiritual dari dimensi kelembagaan, dan kebutuhan riil masyarakat Muslim di pedesaan. Rowlands dan Kabeer⁴³ Menunjukkan bahwa pemberdayaan yang efektif harus berangkat dari sistem nilai dan identitas yang bermakna bagi subjeknya. Bagi perempuan Muslim di pedesaan, nilai-nilai keislaman merupakan sumber motivasi, makna, dan identitas yang tidak dapat diabaikan.

Keempat, program Kembang Jayanti hadir sebagai respons kebijakan yang potensial dan inovatif, namun belum pernah dikaji secara sistematis maupun secara akademik. Ketiadaan dokumentasi akademik berarti potensi replikasi dan kontribusi teoretisnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tanpa kajian yang mendalam, faktor-faktor keberhasilan dan hambatan program tidak dapat diidentifikasi dengan baik, sehingga menghambat kemampuan para pembuat kebijakan dan praktisi pemberdayaan untuk belajar dari program tersebut.

Kelima, dalam khazanah akademik studi dakwah Indonesia, belum terdapat model konseptual yang secara integratif mempertemukan: dakwah struktural sebagai instrumen kebijakan formal pemerintah desa, pemberdayaan janda usia produktif sebagai subjek dan agen perubahan, serta ketahanan sosial ekonomi holistik (spiritual, sosial, material) sebagai output yang dituju. Kekosongan konseptual ini membatasi kemampuan akademisi dan praktisi dakwah dalam merancang intervensi yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, serta dengan mempertimbangkan cakupan, kelayakan, dan signifikansi penelitian pada level disertasi doctoral, rumusan masalah utama penelitian ini adalah: Bagaimana dakwah struktural yang diimplementasikan oleh pemerintah desa melalui program Kembang Jayanti

⁴²Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Inklusif Indonesia 2021* (Jakarta: OJK, 2021), 5.

⁴³N. Kabeer, "Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," dalam *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, ed. A. Sisask (Stockholm: SIDA, 2001), 17–54.

berkontribusi terhadap pembentukan ketahanan sosial ekonomi pada janda usia produktif di Desa Ganjar Sabar?

Rumusan masalah utama tersebut kemudian diturunkan menjadi empat pertanyaan penelitian yang masing-masing bersifat spesifik, dapat dijawab secara empiris, dan secara kolektif membentuk jawaban yang komprehensif:

1. Bagaimana pemerintah desa memaknai dan mempraktikkan dakwah struktural dalam upaya pemberdayaan janda usia produktif sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Desa Ganjar Sabar? (RQ 1)
2. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan (janda usia produktif) dalam membangun ketahanan sosial dan perubahan perilaku untuk menghadapi tekanan ekonomi dan sosial di Desa Ganjar Sabar? (RQ 2)
3. Bagaimana nilai-nilai dakwah yang ditransformasikan oleh pemerintah desa dan tokoh lokal menjadi strategi pemberdayaan yang menyentuh aspek spiritual, sosial, dan ekonomi di Desa Ganjar Sabar? (RQ 3)
4. Bagaimana kesejahteraan spiritual dan material janda usia produktif dimaknai dan dialami dalam konteks implementasi dakwah struktural melalui kegiatan ekonomi produktif di Desa Ganjar Sabar? (RQ 4)

Keempat pertanyaan penelitian ini bersifat simetris dengan empat tujuan penelitian yang akan dirumuskan pada bagian berikutnya. Secara kolektif, RQ 1 dan RQ 3 berfokus pada dimensi kelembagaan dan kebijakan (bagaimana pemerintah desa bekerja), sementara RQ 2 dan RQ 4 berfokus pada dimensi pengalaman dan dampak (bagaimana subjek berubah). Simetri ini mencerminkan kerangka analisis struktural agensi yang menjadi landasan penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan secara simetris dengan empat pertanyaan penelitian di atas dan bersifat deskriptif analitis, sebagaimana konsisten dengan paradigma penelitian kualitatif studi kasus. Tujuan penelitian ini bukan bersifat kausal prediktif, melainkan interpretatif transformatif yang bertujuan menghasilkan pemahaman yang kaya, mendalam, dan kontekstual tentang mekanisme dakwah struktural sebagai instrumen pemberdayaan perempuan.

Perlu ditegaskan secara eksplisit sejak subbab ini agar tidak menimbulkan kerancuan kedudukan: penelitian ini adalah studi akademik (penelitian kualitatif) yang MENELITI dan MENGANALISIS sebuah program pemberdayaan yang telah digagas dan dijalankan secara independen oleh Pemerintah Desa Ganjar Sabar sejak 2020—yakni Kelompok Usaha Bersama Kembang Jayanti—bukan penelitian yang dengan sendirinya MERUPAKAN atau MELAKSANAKAN program pemberdayaan tersebut. Peneliti berposisi sebagai pengamat dan penganalisis akademik dari luar struktur pelaksana program yang datang untuk mendokumentasikan, membedah, dan mengevaluasi secara kritis sebuah kebijakan dan praktik yang sudah berjalan, bukan sebagai perancang, pelaksana, atau penerima manfaat program itu sendiri. Perbedaan kedudukan ini penting ditegaskan karena sepanjang disertasi ini, istilah "program" merujuk pada objek yang diteliti (Kelompok Usaha Bersama Kembang Jayanti beserta kebijakan yang melandasinya), sedangkan istilah "penelitian" merujuk pada aktivitas ilmiah peneliti dalam mendokumentasikan, menganalisis, dan mengevaluasi objek tersebut menggunakan kerangka teori dan metodologi Ilmu Dakwah.

Tujuan Pertama: Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemerintah desa memaknai dan mempraktikkan dakwah struktural dalam upaya pemberdayaan janda usia produktif sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Desa Ganjar Sabar. Tujuan ini menjawab RQ 1 dan berfokus pada dimensi institusional tentang bagaimana pemerintah desa mendesain, meregulasi, dan mengimplementasikan program Kembang Jayanti sebagai ekspresi dakwah struktural.

Tujuan Kedua: Mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan perempuan (janda usia produktif) dalam membentuk ketahanan sosial dan perubahan perilaku dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial di Desa Ganjar Sabar. Tujuan ini menjawab RQ 2 dan berfokus pada dimensi proses, yaitu bagaimana mekanisme pemberdayaan bekerja pada tingkat individu dan komunitas.

Tujuan Ketiga: Mendeskripsikan dan menganalisis proses transformasi nilai-nilai dakwah oleh pemerintah desa dan tokoh lokal menjadi strategi pemberdayaan yang menyentuh aspek spiritual, sosial, dan ekonomi di Desa Ganjar

Sabar. Tujuan ini menjawab RQ 3 dan berfokus pada dimensi nilai: bagaimana ajaran Islam diterjemahkan menjadi tindakan kebijakan yang konkret dan terukur.

Tujuan Keempat: Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kesejahteraan spiritual dan material janda usia produktif dimaknai dan dialami dalam konteks implementasi dakwah struktural melalui kegiatan ekonomi produktif di Desa Ganjar Sabar. Tujuan ini menjawab RQ 4 dan berfokus pada dimensi output: bagaimana perubahan dalam dimensi material dan spiritual dimaknai dan dialami oleh subjek penelitian.

Secara kumulatif, keempat tujuan ini dirancang untuk menghasilkan Model Konseptual Dakwah Struktural Desa (MKDSD), sebuah kontribusi teoritis yang menempatkan pemerintah desa sebagai aktor dakwah struktural yang sah dan efektif, serta mengintegrasikan dimensi spiritual ke dalam kerangka pemberdayaan perempuan yang selama ini cenderung sekuler dan materialistik. Model ini diharapkan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga actionable bagi para praktisi pemberdayaan dan pembuat kebijakan di tingkat desa dan supradesa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis (Teoretis)

Pertama, perluasan dan penajaman teori dakwah struktural. Studi ini akan memperkaya khazanah teori dakwah struktural yang selama ini sebagian besar dikembangkan dalam konteks regulasi supradesa⁴⁴ Dengan menambahkan dimensi yang selama ini luput: pemerintah desa sebagai aktor dakwah struktural. Dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai dakwah dapat dioperasionalisasikan melalui surat keputusan kepala desa, alokasi Dana Desa, dan program terstruktur berbasis komunitas, penelitian ini memperluas cakupan konseptual dakwah struktural ke tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.

⁴⁴ M. Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (Semarang: Walisongo Press, 2003); Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

Kedua, kontribusi terhadap teori pemberdayaan perempuan berbasis nilai-nilai Islam. Kajian pemberdayaan perempuan selama ini didominasi oleh perspektif sekuler feminis yang cenderung mengabaikan peran nilai-nilai keagamaan ⁴⁵. Penelitian ini menawarkan counternarrative yang empiris dan terdokumentasi dengan baik: bahwa nilai-nilai Islam, apabila diintegrasikan secara tepat dalam program pemberdayaan, justru dapat menjadi katalisator yang lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down yang tidak mempertimbangkan sistem nilai lokal.

Ketiga, pengayaan konsep ketahanan sosial ekonomi. Penelitian ini akan berkontribusi terhadap pemahaman baru tentang ketahanan sosial ekonomi (*socioeconomic resilience*) dengan mengartikulasikan dimensi spiritual sebagai komponen yang setara dengan dimensi material, psikologis, dan sosial. Kajian-kajian terdahulu tentang resilience komunitas ⁴⁶ Umumnya, tidak memasukkan spiritualitas sebagai variabel analisis yang eksplisit merupakan kelemahan konseptual yang kritis dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, di mana religiusitas secara nyata berfungsi sebagai sumber daya ketahanan utama.

Keempat, pengembangan metodologi studi kasus kualitatif dalam kajian dakwah. Dengan menggunakan desain studi kasus instrumental ⁴⁷ Dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini mendemonstrasikan pendekatan metodologis yang rigus dan layak diadopsi dalam penelitian dakwah yang bersifat empiris transformatif, sehingga memperluas repertoar metodologis yang tersedia bagi peneliti ilmu dakwah di Indonesia.

⁴⁵ J. Rowlands, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras* (Oxford: Oxfam, 1997); N. Kabeer, "Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," dalam *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, ed. A. Sisask (Stockholm: SIDA, 2001), 17–54.

⁴⁶ F. H. Norris et al., "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness," *American Journal of Community Psychology* 41, no. 1–2 (2008): 127–150; W. N. Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, no. 3 (2000): 347–364.

⁴⁷ R. E. Stake, *The Art of Case Study Research* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1995).

Kelima, kontribusi terhadap pengembangan ilmu dakwah sebagai disiplin. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pengembangan dakwatologi sebagai ilmu yang tidak hanya normatif preskriptif, melainkan juga memiliki basis empiris yang kuat dalam kajian transformasi sosial. Dengan menyandingkan ilmu dakwah dengan teori-teori sosial kontemporer (Giddens, Sen, Freire), penelitian ini menunjukkan bahwa studi dakwah dapat dan harus terlibat dalam diskursus akademik interdisipliner yang lebih luas.

Keenam, kontribusi metodologis pada praktik negative case analysis dalam penelitian dakwah. Penelitian ini secara sengaja memperluas basis informan dari empat belas menjadi tiga puluh orang melalui gelombang kedua pengumpulan data, dengan secara eksplisit mencari kasus negatif (dua Ketua RW yang mengaku minim pengetahuan tentang program) alih-alih berhenti pada data yang telah mengonfirmasi narasi keberhasilan. Praktik metodologis ini masih jarang didokumentasikan secara eksplisit dan transparan dalam penelitian dakwah struktural maupun kajian pemberdayaan berbasis nilai Islam di Indonesia, yang sebagian besar cenderung berhenti pada informan yang mengonfirmasi keberhasilan program. Dengan mendemonstrasikan bagaimana pencarian kasus negatif yang disengaja dapat memperkaya, bukan melemahkan, kredibilitas sebuah kajian kualitatif, penelitian ini menawarkan model praktik metodologis yang dapat direplikasi oleh peneliti dakwah dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

2. Manfaat Praktis (Kebijakan dan Lapangan)

Pertama, blueprint kebijakan desa. Hasil penelitian ini akan menyediakan model kebijakan yang terperinci dan berbasis bukti empiris bagi pemerintah desa lain yang ingin mengembangkan program pemberdayaan perempuan berbasis dakwah struktural. Blueprint ini akan mencakup: struktur regulasi yang diperlukan, mekanisme alokasi Dana Desa, desain program pelatihan, mekanisme modal bergulir berbasis syariah, serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif.

Kedua, input kebijakan supradesa. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berbasis bukti bagi perumusan kebijakan di level kabupaten (Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan) dan level nasional (panduan penggunaan Dana Desa berbasis gender), khususnya dalam mendorong integrasi

dimensi spiritualitas dan nilai-nilai kearifan lokal dalam program pemberdayaan yang selama ini cenderung sekuler dan seragam.

Ketiga, panduan praktis bagi para aktor pemberdayaan. Penelitian ini akan menghasilkan panduan praktis bagi para pendamping desa, fasilitator program, tokoh agama, dan pengurus lembaga dakwah yang bekerja di lapangan tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam program pemberdayaan ekonomi komunitas secara efektif dan berkelanjutan.

Keempat, rekomendasi penanganan bank emok berbasis komunitas. Pengalaman Desa Ganjar Sabar dalam menyediakan alternatif kredit berbasis qardh hasan sebagai pengganti bank emok dapat menjadi model penanganan praktik keuangan informal yang eksploitatif berbasis komunitas, yaitu pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan represif atau regulasi semata.

Kelima, protokol sosialisasi berjenjang berbasis RW. Berdasarkan temuan kasus negatif yang mengungkap ketidakmerataan jangkauan sosialisasi program antarwilayah (Bab IV), penelitian ini menghasilkan protokol operasional konkret (Model Sosialisasi Berjenjang Berbasis RW) yang dapat langsung diadopsi oleh pemerintah desa mana pun untuk memastikan program pemberdayaan berbasis nilai menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata, bukan hanya kelompok yang kebetulan memiliki jejaring lebih kuat dengan pusat kebijakan desa—sebuah kontribusi praktis yang lahir langsung dari komitmen penelitian ini terhadap kejujuran metodologis dan negative case analysis.

Penelitian ini secara sadar menetapkan batasan yang berfungsi untuk menjaga fokus analisis, memastikan kedalaman kajian, dan mencegah temuan dilusi akibat cakupan yang terlalu luas. Batasan ini bukan merupakan kelemahan penelitian, melainkan merupakan pilihan metodologis yang disengaja sesuai dengan prinsip desain penelitian kualitatif studi kasus yang berorientasi pada "*thick description*"⁴⁸ Alih-alih generalisasi statistik.

⁴⁸ C. Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), 84.

Dimensi Batasan	Cakupan dalam Penelitian Ini	Justifikasi Pembatasan
Subjek Penelitian	Janda usia produktif (25 –55 tahun) yang aktif mengikuti program Kembang Jayanti di Desa Ganjar Sabar, serta aktor-aktor kelembagaan: kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan fasilitator program.	Fokus pada janda usia produktif karena kelompok ini memiliki kapasitas dan potensi tertinggi untuk pemberdayaan transformatif, sekaligus menghadapi tekanan paling akut.
Objek Penelitian	Program Kembang Jayanti sebagai implementasi dakwah struktural mencakup: proses kebijakan, mekanisme implementasi, dinamika partisipasi, dan dampak yang dapat diamati secara kualitatif.	Program Kembang Jayanti dipilih karena keunikannya sebagai contoh dakwah struktural berbasis pemerintah desa yang belum pernah dikaji secara sistematis.
Aspek yang Dikaji	Peran pemerintah desa, proses pemberdayaan, transformasi nilai-nilai dakwah, dan dampak terhadap ketahanan sosial ekonomi. Tidak termasuk: dinamika politik desa, kebijakan pemerintah kabupaten/provinsi, atau aspek hukum tata negara.	Pembatasan aspek ini memastikan penelitian tetap berada dalam lingkup keilmuan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, serta tidak melebar ke domain ilmu politik atau hukum.
Pendekatan Metodologis	Kualitatif studi kasus instrumental. Eksplorasi makna, proses, dan pengalaman: bukan	Kompleksitas fenomena dakwah struktural dan pemberdayaan perempuan memerlukan pendekatan

Dimensi Batasan	Cakupan dalam Penelitian Ini	Justifikasi Pembatasan
	pengukuran statistik, uji hipotesis, atau generalisasi kuantitatif.	yang mampu menangkap nuansa, konteks, dan makna secara mendalam.
Cakupan Wilayah	Single site: Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Tidak mencakup perbandingan antardesa maupun antarkabupaten.	Single site dipilih untuk memaksimalkan kedalaman analisis. Perbandingan antarlokasi dapat menjadi topik penelitian lanjutan.
Rentang Waktu	Sejak penerbitan SK Kembang Jayanti (Desember 2020) hingga tahun penelitian dilaksanakan (2024). Data historis sebelum program dapat digunakan sebagai konteks perbandingan.	Rentang ini memungkinkan analisis longitudinal yang mencakup fase pembentukan, implementasi, dan pematangan program.

Untuk menghindari ambiguitas konseptual dan memastikan konsistensi penggunaan terminologi sepanjang naskah disertasi ini, berikut adalah definisi operasional untuk enam konsep kunci yang membentuk kerangka penelitian. Definisi-definisi ini bersifat operasional, yakni mendefinisikan bagaimana konsep tersebut digunakan dan dipahami dalam konteks penelitian ini secara spesifik bukan bersifat universal atau normatif.

Konsep Kunci	Definisi Operasional dalam Penelitian Ini	Referensi Teoritis
Dakwah Struktural	Transformasi nilai-nilai Islam menjadi kebijakan publik formal, regulasi tertulis, program terstruktur, dan alokasi anggaran resmi yang diimplementasikan melalui otoritas institusional pemerintahan formal dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa. Bukan sekadar ceramah, pengajian, atau kegiatan keagamaan informal.	Sulthon (2003) ⁴⁹ ; Amin ⁵⁰
Pemberdayaan Perempuan	Proses perubahan terstruktur yang mencakup tiga tahapan: penyadaran diri (consciousness raising), penguatan kapasitas (capacity building), dan aktualisasi diri (self actualization). Dimediasi oleh program berbasis komunitas yang didukung nilai dakwah dan otoritas formal pemerintah desa.	Freire ⁵¹ ; Rowlands ⁵² ; Kabeer ⁵³
Ketahanan Sosial Ekonomi	Kapasitas individu dan kelompok untuk bertahan, beradaptasi, dan	Norris et al. (2008) ⁵⁴ ; Adger ⁵⁵ ; Chambers ⁵⁶

⁴⁹ M. Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (Semarang: Walisongo Press, 2003), 66.

⁵⁰ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2009), 89.

⁵¹ P. Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, terj. M. B. Ramos (New York: Herder and Herder, 1970), 88.

⁵² J. Rowlands, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras* (Oxford: Oxfam, 1997), 43.

⁵³ N. Kabeer, "Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," dalam *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, ed. A. Sisask (Stockholm: SIDA, 2001), 17–54.

⁵⁴ F. H. Norris et al., "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness," *American Journal of Community Psychology* 41, no. 1–2 (2008): 127–150.

⁵⁵ W. N. Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, no. 3 (2000): 347–364.

⁵⁶ R. Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), 52.

Konsep Kunci	Definisi Operasional dalam Penelitian Ini	Referensi Teoritis
	bertransformasi dalam menghadapi tekanan sosial ekonomi. Dioperasionalkan dalam empat dimensi: material (pendapatan, aset); psikologis (daya juang, harapan); sosial (solidaritas, jaringan); dan spiritual (nilai, makna hidup, religiusitas).	
Janda Usia Produktif	Perempuan berusia 25 55 tahun yang telah bercerai atau ditinggal wafat suaminya; masih memiliki kapasitas fisik, psikologis, dan sosial untuk bekerja dan berpartisipasi aktif; serta terdaftar sebagai peserta aktif program Kembang Jayanti di Desa Ganjar Sabar.	BPS ⁵⁷ ; Puskesmas Desa Ganjar Sabar ⁵⁸
Program Kembang Jayanti	Kelompok Usaha Bersama Kembang Jayanti yang didirikan berdasarkan SK Kepala Desa Ganjar Sabar ⁵⁹ Nomor 141/SK-23/Des/XII/2020, sebagai wahana dakwah struktural yang mengintegrasikan: pelatihan keterampilan usaha, akses modal bergulir berbasis qardh hasan, dan	SK Kepala Desa Ganjar Sabar No. 141/SK-23/Des/XII/2020

⁵⁷Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (Jakarta: BPS RI, 2023).

⁵⁸Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Ganjar Sabar, *Data Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Ganjar Sabar Tahun 2024* (Bandung: Pemerintah Desa Ganjar Sabar, 2024), dokumen internal.

⁵⁹Surat Keputusan Kepala Desa Ganjar Sabar Nomor 141/SK-23/Des/XII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kembang Jayanti.

Konsep Kunci	Definisi Operasional dalam Penelitian Ini	Referensi Teoritis
	pembinaan nilai-nilai spiritual Islam.	
Bank Emok	Praktik pinjaman keliling informal yang beroperasi di luar pengawasan OJK, dengan tingkat bunga efektif sangat tinggi (20 40% per bulan), sistem penagihan mingguan, dan tanpa agunan. Mengandung unsur riba yang dilarang dalam hukum Islam dan memperburuk kemiskinan struktural peminjam.	OJK; Budiarto ⁶⁰

Empat dimensi ketahanan sosial ekonomi di atas—material, psikologis, sosial, dan spiritual—memerlukan penguatan pijakan teoretis masing-masing agar tidak sekadar menjadi kategori deskriptif. **Dimensi material** dipahami mengikuti pendekatan kapabilitas Sen dan Nussbaum, yakni bukan sekadar kepemilikan aset atau pendapatan (functioning), melainkan kapasitas riil untuk mengonversi aset tersebut menjadi pilihan hidup yang bernilai (capability), sehingga indikatornya mencakup akses pasar dan literasi finansial, bukan hanya jumlah modal yang diterima. **Dimensi psikologis** dipijakkan pada konsep religious coping Pargament (1997), yang membedakan strategi koping positif (tawakal, qana'ah) dari strategi koping negatif, sehingga penguatan daya juang dan harapan dalam penelitian ini ditelusuri melalui pola coping yang digunakan informan, bukan diasumsikan otomatis hadir. **Dimensi sosial** merujuk pada modal sosial Putnam, dibedakan antara bonding social capital (solidaritas internal kelompok) dan bridging social capital (jaringan lintas kelompok ke RW dan desa), pembedaan yang penting karena temuan penelitian ini menunjukkan penguatan bonding jauh lebih konsisten

⁶⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Inklusif Indonesia 2021* (Jakarta: OJK, 2021).

dibandingkan bridging. **Dimensi spiritual** dipahami melalui maqashid al-syariah, khususnya hifdz al-nafs (perlindungan jiwa dari tekanan psikologis akibat kehilangan) dan hifdz al-mal (perlindungan harta dari eksploitasi riba bank emok), sehingga penguatan spiritual dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai peningkatan ritual keagamaan semata, melainkan sebagai internalisasi nilai yang berfungsi melindungi kepentingan dasar (maslahat) informan. Keempat pijakan teoretis ini digunakan secara konsisten sebagai lensa analitis sepanjang Bab IV, khususnya pada pembahasan RQ 2 dan RQ 4.

E. Kerangka Berpikir

1. Landasan Filosofis dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini berpijak pada paradigma interpretivisme konstruktivisme⁶¹ yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang dihasilkan oleh interaksi antara agen (individu dan kelompok) dengan struktur (institusi, nilai, dan sistem). Paradigma ini dipilih karena fenomena yang diteliti dakwah struktural sebagai instrumen pemberdayaan perempuan pada dasarnya adalah fenomena yang bermakna ganda (multi layered meaning): ia mengandung dimensi teologis normatif (nilai-nilai Islam), dimensi institusional (kebijakan pemerintah desa), dan dimensi experiential (pengalaman hidup para janda). Pemahaman yang komprehensif hanya mungkin dicapai melalui pendekatan yang sensitif terhadap konteks, makna, dan perspektif subjek penelitian.

Secara ontologis, penelitian ini mengakui bahwa realitas sosial bersifat jamak, kontekstual, dan secara sosial dikonstruksi tidak ada satu "kebenaran tunggal" yang dapat diungkap melalui pengukuran kuantitatif. Secara epistemologis, penelitian ini menganut prinsip bahwa pengetahuan yang bermakna dihasilkan melalui dialog yang mendalam antara peneliti dengan subjek penelitian, bukan melalui observasi yang terpisah dan "objektif." Implikasi metodologisnya adalah digunakannya desain penelitian kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data triangulasi (wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen).

⁶¹ Y. S. Lincoln dan E. G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park: Sage Publications, 1985), 78.

2. Pijakan Teoretis: Sintesis Tiga Teori Utama

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun di atas sintesis tiga teori utama yang saling melengkapi dan secara bersama sama mampu menjelaskan kompleksitas fenomena yang diteliti:

a. Structuration Theory ⁶². Teori strukturasi Anthony Giddens menyediakan kerangka untuk memahami relasi antara agen dan struktur dalam proses transformasi sosial. Konsep kunci "duality of structure" Giddens menegaskan bahwa agen (individu/kelompok) dan struktur (institusi/sistem normatif) bukan merupakan entitas yang terpisah, melainkan saling membentuk secara rekursif: agen menciptakan, mereproduksi, dan mentransformasi struktur melalui tindakan mereka, sementara struktur membentuk dan memungkinkan tindakan agen. Dalam konteks penelitian ini: pemerintah desa sebagai struktur formal membentuk orientasi dan tindakan janda sebagai agen melalui program Kembang Jayanti; sebaliknya, partisipasi aktif para janda memperkuat legitimasi program dan mendorong transformasi struktur desa ke arah yang lebih responsif gender dan responsif spiritual.

b. Teori Dakwah Struktural ⁶³. Teori dakwah struktural memberikan kerangka normatif analitis untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat dan seharusnya diimplementasikan melalui instrumen kelembagaan formal. Sulthon (2003)⁶⁴ membedakan antara dakwah kultural yang beroperasi melalui internalisasi nilai-nilai secara informal dalam proses enkulturasi dengan dakwah struktural yang beroperasi melalui transformasi sistem dan institusi. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa dakwah struktural yang paling efektif adalah yang mampu mengintegrasikan otoritas formal kelembagaan dengan resonansi kultural nilai-nilai yang dipromosikan—persis seperti yang dilakukan program Kembang Jayanti yang menggabungkan kekuatan SK kepala desa dengan nilai-nilai Islam yang sudah

⁶² A. Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984).

⁶³ M. Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (Semarang: Walisongo Press, 2003).

⁶⁴ M. Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (Semarang: Walisongo Press, 2003), 66.

mengakar dalam budaya masyarakat Sunda Muslim, sebuah hipotesis yang akan diuji langsung melalui temuan Bab IV.

c. Teori Pemberdayaan Transformatif⁶⁵. Teori pemberdayaan yang dikembangkan oleh Paulo Freire melalui konsep conscientizacao (penyadaran kritis) memberikan kerangka untuk memahami proses transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Rowlands memperluas konsep ini dengan mengenalkan tiga dimensi pemberdayaan: personal (peningkatan kepercayaan diri dan⁶⁶kapabilitas individu), relasional (transformasi relasi kuasa dalam hubungan interpersonal), dan kolektif (aksi bersama yang menghasilkan dampak sistemik). Kabeer menambahkan dimensi "agency" kemampuan untuk membuat pilihan yang bermakna sebagai inti dari pemberdayaan. Ketiga perspektif ini digunakan untuk menganalisis proses dan output pemberdayaan dalam program Kembang Jayanti, dengan perhatian khusus pada bagaimana nilai-nilai dakwah memperkuat atau memodifikasi mekanisme pemberdayaan yang digambarkan oleh ketiga teoritis tersebut.⁶⁷

Ketiga teori di atas digunakan dalam penelitian ini secara komplementer, bukan kompetitif. Teori Giddens menyediakan "bingkai ontologis" yang menjelaskan bagaimana perubahan sosial dapat terjadi melalui interaksi rekursif agen struktur. Teori dakwah struktural menyediakan "bingkai normatif" yang menjelaskan mengapa dan bagaimana nilai-nilai Islam harus ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang berkeadilan. Teori pemberdayaan transformatif menyediakan "bingkai operasional" yang menjelaskan mekanisme konkret melalui mana transformasi individu dan komunitas dapat difasilitasi. Sintesis ketiganya menghasilkan kerangka analisis yang kaya secara teoretis, kuat secara empiris, dan relevan secara praktis untuk memahami fenomena yang diteliti.

⁶⁵ P. Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, terj. M. B. Ramos (New York: Herder and Herder, 1970); J. Rowlands, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras* (Oxford: Oxfam, 1997); N. Kabeer, "Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," dalam *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, ed. A. Sisask (Stockholm: SIDA, 2001), 17–54.

⁶⁶J. Rowlands, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras* (Oxford: Oxfam, 1997).

⁶⁷N. Kabeer, "Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," dalam *Discussing Women's Empowerment: Theory and Practice*, ed. A. Sisask (Stockholm: SIDA, 2001), 17–54.

Penting dicatat bahwa sintesis ini bukan tanpa tegangan. Teori Freire, yang berakar dalam tradisi Marxis humanis, pada dasarnya bersifat sekuler dan kadang kala mengandung kritik implisit terhadap peran agama sebagai instrumen "penidur kesadaran kritis" (dalam bahasa Freire: "domestication"). Penelitian ini secara sadar menempatkan diri dalam posisi yang berbeda: ia melihat nilai-nilai Islam bukan sebagai hambatan kesadaran kritis, melainkan sebagai sumber daya epistemologis yang justru dapat menggerakkan proses conscientizacao yang lebih dalam karena bagi perempuan Muslim pedesaan, kesadaran akan hak-hak mereka tidak terpisahkan dari kesadaran akan tanggung jawab keagamaan mereka sebagai ibu, anggota komunitas, dan hamba Allah. Tegangan produktif antara Freire dan perspektif Islam ini akan menjadi salah satu tema analitis yang menarik untuk dikembangkan dalam pembahasan temuan penelitian.

3. Model Analisis: Empat Simpul dalam Satu Kerangka Dinamis

Berdasarkan sintesis teoretis di atas, kerangka berpikir penelitian ini diorganisasikan dalam empat simpul yang membentuk sistem analisis yang dinamis dan rekursif. Keempat simpul ini bukanlah tahapan linear yang berurutan secara kaku, melainkan elemen-elemen sistem yang saling berinteraksi secara kompleks dalam satu proses sosial yang hidup dan terus bergerak.

Simpul I Kondisi Awal (Starting Point): Kemiskinan struktural multidimensi janda usia produktif di Desa Ganjar Sabar. Kondisi ini mencakup: deprivasi material (ketiadaan pendapatan tetap, tidak ada akses kredit formal), deprivasi sosial (stigma janda, isolasi sosial, lemahnya jaringan dukungan), dan deprivasi spiritual (krisis makna, rendahnya kepercayaan diri berbasis nilai agama). Kondisi ini diperparah oleh fenomena bank emok yang menciptakan mekanisme eksploitasi yang bersifat struktural dan yang mengandung unsur riba bertentangan langsung dengan nilai-nilai Islam yang dipegang oleh komunitas.

Simpul II Intervensi (Turning Point): Dakwah struktural pemerintah desa melalui instrumen kebijakan formal. Pada simpul ini, nilai-nilai Islam ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang memiliki kekuatan hukum (SK kepala desa), alokasi anggaran (Dana Desa), dan mekanisme implementasi yang terstruktur. Transformasi ini dimungkinkan oleh kondisi unik: kepemimpinan

kepala desa perempuan yang memiliki legitimasi ganda (formal institusional dan moral keagamaan), yang menjadikannya mampu menjembatani antara otoritas negara dengan otoritas moral komunitas.

Perlu dicatat sejak awal bahwa Simpul II ini, meski dirumuskan sebagai satu titik keputusan kebijakan, dalam praktiknya terdistribusi secara tidak merata ke dua puluh dua wilayah RW yang ada di desa, dengan intensitas pelaksanaan yang sangat bergantung pada inisiatif Ketua RW masing-masing. Dimensi spasial ini, yang baru terungkap secara eksplisit melalui data lapangan pada Bab IV, menjadi salah satu penyempurnaan penting terhadap kerangka berpikir awal ini dan akan dibahas secara khusus pada pembahasan verifikasi model di Bab IV.E.

Simpul III Proses (Mechanism): Pemberdayaan perempuan melalui program Kembang Jayanti yang berlangsung dalam lima tahap siklus: (1) penyadaran kritis tentang hak, potensi, dan identitas Islami sebagai perempuan; (2) penguatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan usaha dan literasi keuangan syariah; (3) pembentukan kelompok dan solidaritas sosial antar anggota Kelompok Usaha Bersama; (4) akses modal bergulir berbasis qardh hasan sebagai alternatif nyata dari jeratan bank emok; dan (5) pendampingan berkelanjutan melalui monitoring dan mentoring usaha secara berkala.

Simpul IV Output (Arrival Point): Ketahanan sosial ekonomi holistik yang mencakup empat dimensi yang saling memperkuat: (a) material peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi; (b) psikologis penguatan kepercayaan diri, daya juang, dan harapan masa depan; (c) sosial penguatan solidaritas komunitas dan pengurangan stigma; serta (d) spiritual penguatan religiusitas dan integrasi identitas sebagai muslimah yang berdaya. Output ini kemudian memberikan umpan balik kepada struktur desa, memperkuat legitimasi dakwah struktural sebagai model pemberdayaan yang berhasil.

Hubungan antar keempat simpul bersifat dinamis dan rekursif setiap tahapan proses dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh simpul-simpul lainnya. Ini selaras dengan prinsip duality of structure Giddens: pemerintah desa sebagai struktur membentuk perilaku dan orientasi janda sebagai agen, sebaliknya respons

dan partisipasi aktif para janda juga membentuk dan memperkuat legitimasi dakwah struktural sebagai kebijakan desa yang berkelanjutan.

4. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka teoretis yang telah dibangun, penelitian ini beroperasi dengan empat proposisi penelitian (research propositions) yang membentuk "teori kerja" (working theory) yang akan diuji dan disempurnakan melalui proses pengumpulan dan analisis data empiris. Proposisi-proposisi ini bersifat tentatif dan terbuka untuk revisi sesuai dengan spirit penelitian kualitatif yang mengutamakan ketepatan deskriptif di atas konfirmasi hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya ⁶⁸.

Proposisi Pertama: Efektivitas dakwah struktural dalam menghasilkan perubahan sosial yang bermakna berbanding lurus dengan tingkat integrasi antara otoritas formal kelembagaan (pemerintah desa) dan resonansi kultural nilai-nilai yang dipromosikan (nilai-nilai Islam) dalam kehidupan komunitas sasaran. Semakin kuat integrasi antara kedua dimensi ini, semakin besar kemungkinan program pemberdayaan menghasilkan perubahan yang tidak sekadar behavioristik (perubahan perilaku eksternal), melainkan transformatif (perubahan orientasi nilai dan identitas yang mendalam).

Proposisi Kedua: Ketahanan sosial ekonomi yang berkelanjutan khususnya bagi kelompok yang mengalami triple deprivation (material, sosial, spiritual) memerlukan intervensi yang secara simultan menyentuh ketiga dimensi tersebut. Intervensi yang hanya berfokus pada dimensi material tanpa disertai pembangunan kapasitas spiritual dan jaringan solidaritas sosial akan menghasilkan ketahanan yang rapuh yang mudah runtuh ketika menghadapi guncangan baru. Program Kembang Jayanti, yang secara eksplisit mengintegrasikan ketiga dimensi melalui pendekatan dakwah struktural, diprediksikan menghasilkan ketahanan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

⁶⁸ J. A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, edisi ke-3 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013),112.

Proposisi Ketiga: Transformasi nilai dakwah menjadi kebijakan publik yang efektif memerlukan mediasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki legitimasi ganda yakni legitimasi formal (otoritas kelembagaan) dan legitimasi moral (kepercayaan komunitas atas integritas keagamaan). Kepala desa yang memiliki latar belakang aktivisme keislaman merepresentasikan tipe aktor dengan legitimasi ganda ini, dan oleh karena itu berada dalam posisi strategis yang unik untuk melakukan dakwah struktural yang melampaui batas-batas konvensional antara urusan keagamaan dan urusan pemerintahan.

Proposisi Keempat: Keberhasilan program pemberdayaan berbasis dakwah struktural dalam mereduksi ketergantungan pada praktik keuangan informal eksploitatif tidak semata-mata bergantung pada tersedianya alternatif kredit yang lebih murah, tetapi juga dan mungkin terutama pada perubahan kognitif dan normatif dalam cara komunitas memandang praktik riba. Efek jangka panjang yang paling signifikan dari program Kembang Jayanti mungkin bukan hanya pada aspek ekonomi, melainkan pada aspek normatif: internalisasi kolektif bahwa riba adalah sesuatu yang harus dihindari bukan hanya karena dilarang agama, tetapi karena secara rasional dan empiris terbukti merusak kapasitas dan martabat komunitas.

Keempat proposisi ini bukan hipotesis dalam pengertian kuantitatif penelitian ini tidak bertujuan membuktikan atau menolak proposisi secara statistik. Sebaliknya, proposisi-proposisi ini berfungsi sebagai "sensitizing concepts"⁶⁹ yang memandu proses pengumpulan dan analisis data, sambil tetap terbuka terhadap temuan-temuan yang tidak terduga yang mungkin merevisi, memperkaya, atau bahkan menantang proposisi awal tersebut.

5. Narasi Bagan Kerangka Berpikir

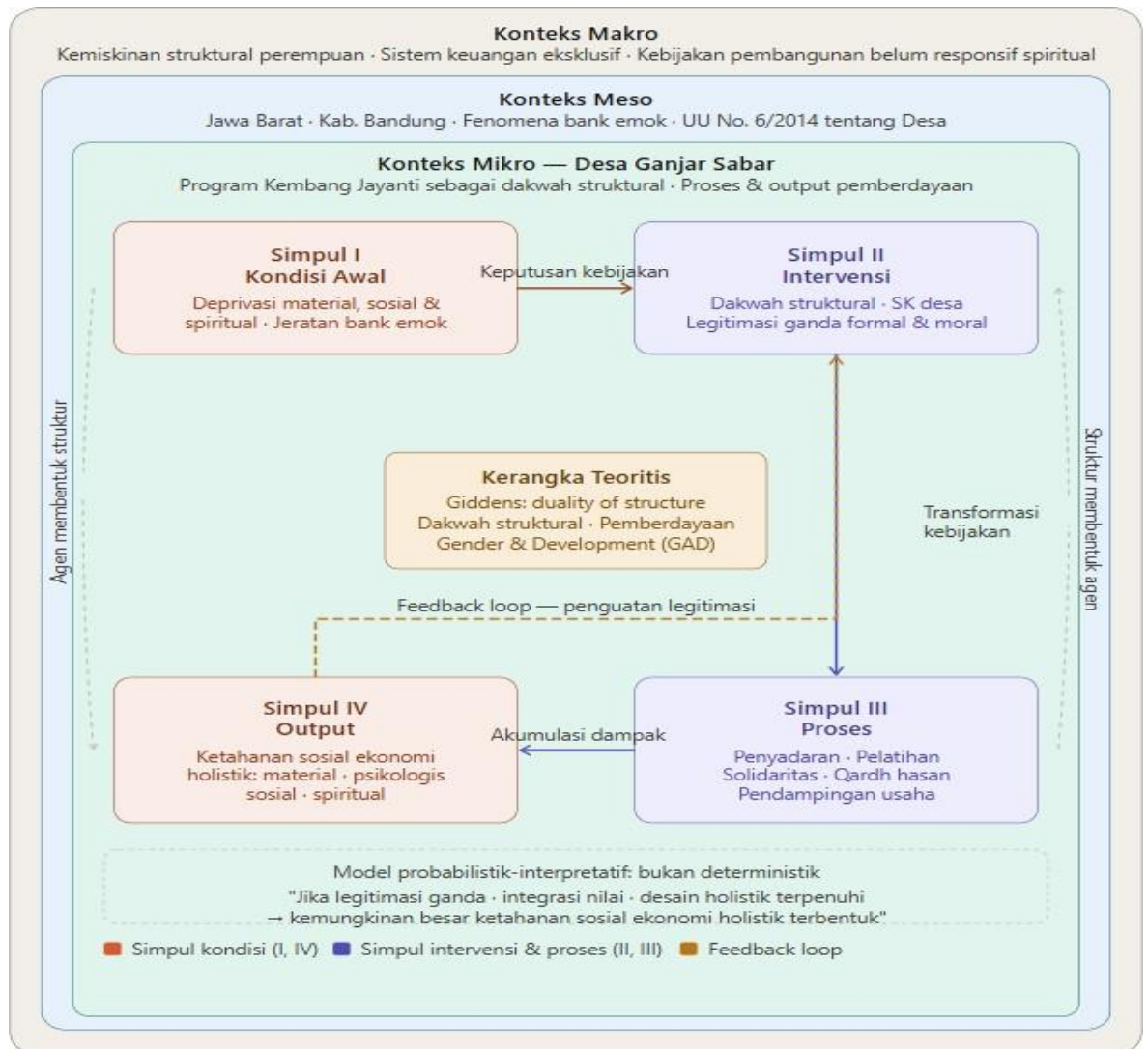
Kerangka berpikir terdiri dari tiga lapisan yang saling berhubungan. Lapisan terluar merepresentasikan konteks makro kondisi struktural kemiskinan perempuan kepala keluarga, sistem keuangan formal yang eksklusif, dan kebijakan pembangunan nasional yang belum responsif terhadap dimensi spiritual. Lapisan

⁶⁹ H. Blumer, "What Is Wrong with Social Theory?" *American Sociological Review* 19, no. 1 (1954): 3–10.

tengah merepresentasikan konteks meso kondisi spesifik Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, termasuk fenomena bank emok sebagai simptom kegagalan sistem, serta kebijakan desa yang dilandasi UU Nomor 6 Tahun 2014. Lapisan terdalam merepresentasikan konteks mikro dinamika internal Desa Ganjar Sabar, program Kembang Jayanti sebagai intervensi dakwah struktural, dan proses serta output pemberdayaan yang dihasilkan.

Pada pusat bagan terdapat model empat simpul yang telah diuraikan sebelumnya. Anak panah yang menghubungkan Simpul I (Kondisi Awal) ke Simpul II (Intervensi) merepresentasikan keputusan kebijakan kepala desa yang digerakkan oleh legitimasi ganda (formal dan moral). Anak panah dari Simpul II ke Simpul III merepresentasikan transformasi kebijakan menjadi mekanisme pemberdayaan operasional. Anak panah dari Simpul III ke Simpul IV merepresentasikan akumulasi dampak dari proses pemberdayaan yang berlangsung secara iteratif. Anak panah dari Simpul IV kembali ke Simpul II yang merepresentasikan feedback loop menunjukkan bahwa keberhasilan program memperkuat legitimasi dan mendorong penguatan kebijakan lebih lanjut. Keseluruhan model ini dibingkai oleh panah rekursif besar yang mengikuti prinsip duality of structure Giddens: agen dan struktur terus menerus saling membentuk dalam proses transformasi sosial yang tidak pernah final.

Yang paling penting untuk dipahami dari bagan ini adalah bahwa ia bukan model deterministik yang mengimplikasikan bahwa "input tertentu selalu menghasilkan output tertentu." Sebaliknya, ia adalah model probabilistik interpretatif yang menyatakan: "apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi (kepemimpinan dengan legitimasi ganda, integrasi nilai dakwah dengan otoritas formal, desain program yang holistik), maka terdapat kemungkinan besar bahwa ketahanan sosial ekonomi holistik akan terbentuk.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

6. Posisi Penelitian dalam Peta Akademik

Penelitian ini berada di persilangan tiga domain akademik yang selama ini relatif terpisah: (1) ilmu dakwah khususnya subdisiplin dakwah struktural dan dakwah pemberdayaan; (2) kajian pemberdayaan perempuan berbasis nilai Islam yang berada di antara studi gender, ekonomi Islam, dan sosiologi agama; serta (3) studi kebijakan dan tata kelola desa yang bersinggungan dengan ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan pengembangan masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak tepat di pusat persilangan ketiga domain tersebut.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang ada, penelitian ini memiliki tiga kebaruan (*novelty*) yang dapat diidentifikasi: Pertama, *novelty* subjek belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pemerintah desa sebagai aktor dakwah struktural dalam memberdayakan janda usia produktif. Kedua, *novelty* konseptual penelitian ini mengintegrasikan dimensi spiritual ke dalam konsep ketahanan sosial ekonomi, menghasilkan konstruk teoretis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Ketiga, *novelty* kontekstual program Kembang Jayanti merupakan kasus yang unik dan belum pernah terdokumentasikan secara akademik, sehingga penelitian ini memiliki nilai eksplorasi dan perintisan yang tinggi.

Klaim keunikan program yang menjadi salah satu argumen kebaruan kontekstual di atas turut dikonfirmasi oleh pengakuan dari instansi pemerintahan supra-desa: sebagaimana akan dipaparkan lebih rinci pada profil Kepala Desa di Bab IV, program Kembang Jayanti telah memperoleh apresiasi dari DPP2KBP3A Kabupaten Bandung dan DPP2KBP3A Provinsi Jawa Barat, bahkan dilaporkan hingga ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Validasi eksternal dari instansi yang berwenang menilai program pemberdayaan perempuan di wilayah yang lebih luas ini memperkuat argumen bahwa nilai eksplorasi dan perintisan penelitian ini bukan semata klaim akademik peneliti, melainkan juga diakui oleh pemangku kepentingan pada level pemerintahan yang lebih tinggi.

F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menyajikan pemetaan sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik disertasi ini, yang dikelompokkan ke dalam lima kluster tematik: (1) kajian tentang dakwah struktural dan pemberdayaan masyarakat; (2) kajian tentang kemiskinan dan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam; (3) kajian tentang ketahanan sosial ekonomi komunitas perempuan; (4) kajian tentang tata kelola desa dan inovasi kebijakan lokal; dan (5) kajian pemberdayaan berbasis nilai Islam dalam konteks internasional. Pemetaan ini berfungsi sebagai peta "state of the art" yang menunjukkan di mana penelitian ini berada dalam lanskap akademik yang ada, serta mengidentifikasi secara presisi celah-celah yang hendak diisi.

1. Kluster I: Kajian Dakwah Struktural dan Pemberdayaan Masyarakat

Sulthon (2003)⁷⁰ dalam *Desain Ilmu Dakwah* merupakan salah satu karya paling komprehensif yang membahas dakwah dari perspektif keilmuan yang sistematis, termasuk perbedaan antara dakwah kultural dan dakwah struktural. Sulthon mendefinisikan dakwah struktural sebagai upaya transformasi masyarakat melalui perubahan sistem dan institusi yang menentukan pola relasi sosial. Meskipun karya ini memberikan fondasi konseptual yang kuat, ia masih bersifat normatif preskriptif dan tidak membahas implementasi dakwah struktural pada level pemerintahan desa. Kekosongan inilah yang menjadi salah satu titik departur penelitian ini.

2. Kluster II: Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Islam

Faizah⁷¹ dalam penelitian disertasinya mengkaji program pemberdayaan perempuan berbasis pesantren di Jawa Timur. Temuannya menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang mengintegrasikan nilai-nilai pesantren dengan pelatihan keterampilan usaha menghasilkan peningkatan kapabilitas yang lebih signifikan dibandingkan program pemberdayaan konvensional. Perbedaan utama

⁷⁰ M. Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (Semarang: Walisongo Press, 2003).

⁷¹ N. Faizah, *Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren di Jawa Timur* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

dengan penelitian ini terletak pada konteks kelembagaan: Faizah mengkaji pesantren sebagai institusi non pemerintah, sementara penelitian ini mengkaji pemerintah desa institusi formal negara sebagai aktor dakwah struktural. Perbedaan konteks kelembagaan ini menghasilkan dinamika yang berbeda secara fundamental dalam aspek legitimasi, keberlanjutan, dan skalabilitas.

Wulandari dan Setyowati⁷² melakukan kajian komparatif terhadap program pemberdayaan perempuan di tiga desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan menemukan bahwa program yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai komunitas menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi dan dampak yang lebih berkelanjutan. Relevansi kajian ini sangat tinggi bagi penelitian ini, karena mengkonfirmasi secara empiris argumen teoritis bahwa "*cultural resonance*" merupakan determinan penting efektivitas program pemberdayaan. Namun, Wulandari dan Setyowati tidak secara eksplisit menganalisis dimensi dakwah struktural maupun dimensi ketahanan sosial ekonomi dalam kerangka konseptual yang integratif.

3. **Kluster III: Ketahanan Sosial Ekonomi Komunitas Perempuan**

Norris et al. (2008)⁷³ dalam artikel landmark mereka di *American Journal of Community Psychology* mendefinisikan resiliensi komunitas sebagai sekumpulan kapabilitas adaptif yang memungkinkan komunitas bertahan dan bertumbuh dalam kondisi adversity. Norris et al. mengidentifikasi empat sumber daya utama: sumber daya ekonomi, sumber daya informasi, sumber daya sosial, dan kompetensi komunitas. Penelitian ini mengadaptasi kerangka Norris et al. secara kritis: dua dimensi operasional (informasi dan kompetensi komunitas) diintegrasikan ke dalam dimensi sosial dan material, sementara dimensi spiritual yang dalam kerangka Norris et al. sama sekali absen ditambahkan sebagai komponen mandiri yang tidak dapat diabaikan dalam konteks komunitas Muslim. Hasil rekonstruksi ini menghasilkan konstruk empat dimensi (material, psikologis,

⁷²A. Wulandari dan E. Setyowati, "Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Komparatif di Tiga Desa Kabupaten Sleman," *Jurnal Kebijakan Publik* 12, no. 2 (2021): 91–108.

⁷³F. H. Norris et al., "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness," *American Journal of Community Psychology* 41, no. 1–2 (2008): 127–150.

sosial, spiritual) yang lebih kontekstual dan tepat sasaran untuk menganalisis ketahanan sosial ekonomi janda usia produktif di lingkungan Muslim pedesaan Indonesia.

Adger (2000)⁷⁴ mendefinisikan resiliensi sosial sebagai kemampuan kelompok dan komunitas untuk mengatasi tekanan dan gangguan eksternal yang diakibatkan oleh perubahan sosial, politik, dan lingkungan. Adger menghubungkan resiliensi sosial dengan resiliensi ekologis, dan menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki modal sosial tinggi (network, norms, trust) lebih mampu menghadapi shock eksternal. Penelitian ini menggunakan kerangka Adger sebagai titik tolak, namun memperluas dimensi modal sosial untuk juga mencakup modal spiritual yang dalam konteks komunitas Muslim pedesaan memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.

Penelitian Susanti⁷⁵ tentang ketahanan ekonomi perempuan kepala keluarga pascabencana di Lombok memberikan wawasan penting tentang mekanisme pemulihan berbasis komunitas. Susanti menemukan bahwa perempuan yang memiliki jaringan sosial religius (pengajian, arisan berbasis masjid) menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Temuan ini secara empiris mendukung proposisi penelitian ini tentang kontribusi dimensi spiritual terhadap ketahanan sosial ekonomi.

4. Kluster IV: Tata Kelola Desa dan Inovasi Kebijakan Lokal

Chattopadhyay dan Duflo (2004)⁷⁶ melakukan evaluasi kuasi eksperimental terhadap dampak kuota kepemimpinan perempuan di desa-desa India dan menemukan bahwa desa-desa yang dipimpin perempuan secara signifikan lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk program-program yang relevan dengan kebutuhan perempuan. Penelitian ini menggunakan temuan Chattopadhyay dan Duflo sebagai proposisi awal bahwa kepemimpinan perempuan di Desa Ganjar Sabar (Siti Hasanah) merupakan kondisi yang memungkinkan lahirnya program

⁷⁴ W. N. Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, no. 3 (2000): 347–364.

⁷⁵ R. Susanti, "Ketahanan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga Pascabencana Gempa Lombok: Peran Jaringan Sosial Religius," *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 25, no. 1 (2020): 67–88.

⁷⁶ R. Chattopadhyay dan E. Duflo, "Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India," *Econometrica* 72, no. 5 (2004): 1409–1443.

Kembang Jayanti namun melangkah lebih jauh dengan menganalisis mekanisme bagaimana kepemimpinan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang bernuansa dakwah struktural.

6. Kluster VI: Kajian tentang Bank Emok dan Keuangan Informal Predatori di Pedesaan

Budiarto dalam kajiannya tentang praktik pinjaman keliling informal (dikenal luas sebagai "bank emok") di Jawa Barat mendokumentasikan bagaimana praktik ini berkembang pesat pascakrisis ekonomi 1998 dan semakin mengakar di kalangan perempuan pedesaan berpenghasilan rendah, dengan tingkat bunga efektif yang dapat mencapai 20-40 persen per bulan. Kajian OJK (2022) tentang literasi dan inklusi keuangan pedesaan menemukan bahwa rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal, dikombinasikan dengan norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga harian, menjadikan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan terpapar praktik ini. Kedua kajian tersebut secara konsisten mengidentifikasi persoalan sisi permintaan (demand-side) dan sisi penawaran (supply-side) dari fenomena bank emok, namun tidak satu pun yang mengkaji secara spesifik bagaimana kebijakan desa dapat diposisikan sebagai instrumen intervensi sisi penawaran melalui penyediaan alternatif kredit berbasis nilai—sebuah celah yang secara langsung diisi oleh penelitian ini melalui kajian mendalam atas mekanisme qardh hasan program Kembang Jayanti.

Wijayanti dan Kusumawati dalam studi mereka tentang jerat utang informal pada perempuan kepala keluarga di Jawa Tengah menemukan pola siklikal: perempuan yang terjerat bank emok cenderung meminjam dari satu pemberi pinjaman untuk melunasi pinjaman lain (gali lubang tutup lubang), sebuah pola yang menciptakan ketergantungan struktural jangka panjang yang sulit diputus tanpa intervensi eksternal yang signifikan. Studi tersebut merekomendasikan intervensi berbasis kelompok (group-based intervention) sebagai strategi paling efektif untuk memutus siklus ini, karena tekanan sosial kelompok dapat menggantikan fungsi disiplin finansial yang sebelumnya dipenuhi secara eksploitatif oleh bank emok. Rekomendasi ini secara langsung relevan dengan

desain Kelompok Usaha Bersama Kembang Jayanti yang menggunakan pendekatan kelompok (bukan pinjaman individual semata) sebagai salah satu pilar utamanya, meski studi Wijayanti dan Kusumawati sendiri tidak mengkaji dimensi keagamaan dari intervensi berbasis kelompok tersebut—dimensi yang menjadi kontribusi khas penelitian ini.

Antlov et al. (2016)⁷⁷ mengkaji implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan implikasinya bagi tata kelola dan kehidupan komunitas desa di Indonesia. Antlov et al. mengidentifikasi bahwa UU Desa membuka peluang besar bagi inovasi kelembagaan di tingkat desa melalui penguatan otonomi dan alokasi Dana Desa, namun kemampuan desa untuk memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan lokal, kapasitas sosial komunitas, dan sejauh mana proses perencanaan desa bersifat partisipatif dan inklusif. Penelitian ini menempatkan program Kembang Jayanti sebagai contoh kasus bagaimana kepemimpinan lokal yang kuat yang menggabungkan otoritas formal dengan integritas moral keagamaan mampu memaksimalkan peluang yang diberikan oleh UU Desa untuk inovasi kebijakan yang transformatif dan berbasis nilai komunitas.

5. Kluster V: Kajian Pemberdayaan Berbasis Nilai Islam dalam Konteks Internasional

Tinjauan terhadap pengalaman internasional memberikan perspektif komparatif yang memperkaya kajian ini. Program Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), yang didirikan sejak tahun 1987 sebagai replikasi model Grameen Bank yang diadaptasi untuk konteks Muslim Melayu, merupakan salah satu program kredit mikro berbasis komunitas paling berhasil di Asia Tenggara. Studi Saad et al. (2018)⁷⁸ menunjukkan bahwa keberhasilan AIM tidak semata-mata karena desain keuangannya yang inovatif (tanpa agunan, kelompok tanggung renteng), melainkan juga karena integrasi yang kuat antara nilai-nilai Islam (amanah, bersaudara, tolong menolong) dengan mekanisme operasional program. Relevansi AIM bagi

⁷⁷ H. Antlov, A. Wetterberg, dan L. Dharmawan, "Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 2 (2016): 161–183.

⁷⁸ N. M. Saad, S. Kassim, dan Z. Hamid, "Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM): An Islamic Microfinance Institution in Malaysia," dalam *Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life*, ed. M. K. Hassan dan A. Aliyu (Cheltenham: Edward Elgar, 2018), 393–412.

penelitian ini terletak pada konfirmasi empirisnya bahwa program keuangan mikro berbasis komunitas Muslim yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara eksplisit menghasilkan tingkat partisipasi dan keberlanjutan yang lebih tinggi. Perbedaan utama dengan penelitian ini: AIM adalah lembaga non pemerintah dengan skala nasional, sementara program Kembang Jayanti adalah inisiatif pemerintah desa dengan skala mikro lokal perbedaan kelembagaan yang menghasilkan dinamika yang berbeda dan layak dikaji tersendiri.

Dalam konteks Bangladesh, pengalaman BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) dalam mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dengan program pembelajaran Islam melalui "shalish" (forum mediasi berbasis komunitas) memberikan pelajaran yang relevan. Studi Mahmud et al. (2012)⁷⁹ menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam program pemberdayaan BRAC yang mengintegrasikan dimensi keagamaan menunjukkan peningkatan "aspirasi" yang lebih signifikan kemampuan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya dibandingkan yang tidak. Konsep "aspirasi" dalam studi Mahmud et al. ini sangat dekat dengan apa yang dalam kerangka penelitian ini disebut sebagai "dimensi psikologis" dari ketahanan sosial ekonomi, dan sekaligus menunjukkan bagaimana dimensi spiritual (keyakinan bahwa perubahan adalah mungkin dan direstui Allah) berkontribusi pada dimensi psikologis tersebut. Temuan ini memperkuat proposisi kedua penelitian ini tentang pentingnya intervensi yang secara simultan menyentuh dimensi spiritual dan psikologis.

Roomi dan Parrott⁸⁰, dalam kajian mereka tentang hambatan pengembangan dan kemajuan wirausahawan perempuan di Pakistan, menunjukkan bahwa hambatan terbesar bagi perempuan Muslim dalam berpartisipasi di ranah ekonomi bukan semata-mata bersifat material (ketiadaan modal), melainkan bersifat normatif kultural: persepsi yang tersebar luas bahwa perempuan tidak sepatutnya terlibat dalam transaksi ekonomi formal tanpa izin atau pendampingan laki-laki dari

⁷⁹ S. Mahmud, N. M. Shah, dan S. Becker, "Measurement of Women's Empowerment in Rural Bangladesh," *World Development* 40, no. 3 (2012): 610–619.

⁸⁰ M. A. Roomi dan G. Parrott, "Barriers to Development and Progression of Women Entrepreneurs in Pakistan," *Journal of Entrepreneurship* 17, no. 1 (2008): 59–72.

keluarganya. Hambatan normatif ini bersifat lebih persisten dan lebih sulit diatasi dibandingkan hambatan material, karena ia melekat dalam sistem nilai yang dihayati oleh komunitas. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan Muslim yang efektif harus didahului atau disertai dengan transformasi normatif perubahan dalam cara komunitas memandang peran dan hak perempuan dalam bidang ekonomi. Program Kembang Jayanti, yang secara eksplisit mengintegrasikan pembinaan nilai-nilai Islam yang menegaskan hak dan tanggung jawab perempuan dalam menafkahi keluarga (berdasarkan konsep Islam tentang kewajiban nafkah yang berlaku dalam situasi kebutuhan), secara tidak langsung juga melakukan pekerjaan transformasi normatif ini dan itulah yang menjadikannya lebih dari sekadar program ekonomi.

Berdasarkan pemetaan lima kluster penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun masing-masing kluster telah menghasilkan wawasan yang berharga, tidak ada satu pun penelitian yang berhasil mengintegrasikan kelima dimensi tersebut secara simultan dan sistematis dalam satu kerangka analisis yang koheren: (1) dakwah struktural melalui pemerintah desa, (2) pemberdayaan perempuan Muslim pedesaan, (3) ketahanan sosial ekonomi holistik termasuk dimensi spiritual, (4) inovasi kebijakan lokal berbasis desentralisasi, dan (5) perbandingan dengan pengalaman internasional yang memperkaya konteks analisis. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menjadikan persilangan kelima dimensi ini sebagai fokus analisis yang terintegrasi sebuah novelty yang dijustifikasikan secara empiris oleh realitas unik Program Kembang Jayanti di Desa Ganjar Sabar.

Berdasarkan penelusuran sistematis terhadap literatur yang telah dipaparkan dalam penelitian terdahulu, berikut dinyatakan originalitas penelitian ini dalam empat dimensi:

Pertama, originalitas pada level analisis unit. Penelitian ini adalah, sepanjang pengetahuan peneliti berdasarkan penelusuran basis data SCOPUS, Google Scholar, DOAJ, dan SINTA, penelitian pertama yang secara eksplisit dan sistematis mengkaji pemerintah desa bukan lembaga dakwah, pesantren, atau organisasi Islam non pemerintah sebagai aktor dakwah struktural dalam konteks

pemberdayaan perempuan. Perbedaan unit analisis ini menghasilkan implikasi yang sangat berbeda: pemerintah desa memiliki kapasitas dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh aktor-aktor lain (legalitas regulasi, alokasi APBD, akuntabilitas publik), namun juga menghadapi batasan-batasan yang unik (rotasi kepemimpinan, kompleksitas birokrasi, potensi politisasi). Memahami mekanisme kerja dakwah struktural dalam konteks kelembagaan yang spesifik ini merupakan kontribusi yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Kedua, originalitas pada level konstruk teoretis. Penelitian ini mengkonstruksi konsep "ketahanan sosial ekonomi holistik berbasis nilai Islam" yang mengintegrasikan secara terpadu empat dimensi: material, psikologis, sosial, dan spiritual. Konstruk ini merupakan perluasan substantif dari konsep ketahanan sosial ekonomi yang ada⁸¹ dengan penambahan dimensi spiritual yang selama ini absen dan penambahan ini bukan sekadar tambalan konseptual, melainkan refleksi dari realitas empiris masyarakat Muslim Indonesia di mana religiusitas secara nyata berfungsi sebagai sumber daya ketahanan yang tidak dapat diabaikan tanpa kehilangan pemahaman yang akurat tentang bagaimana komunitas tersebut sesungguhnya bertahan dan berkembang.

Ketiga, originalitas pada level empiris dan kontribusi kebijakan. Program Kembang Jayanti di Desa Ganjar Sabar merupakan kasus yang benar-benar original ia belum pernah didokumentasikan, dianalisis, atau dikonseptualisasikan dalam literatur akademik manapun. Dengan menyediakan dokumentasi yang mendalam dan analisis yang sistematis terhadap kasus ini, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan "*evidence base*" bagi kebijakan pemberdayaan perempuan berbasis nilai Islam di tingkat desa sebuah basis bukti yang saat ini sangat tipis namun sangat dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan, praktisi pemberdayaan, dan akademisi yang bekerja di ranah ini.

⁸¹ F. H. Norris et al., "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness," *American Journal of Community Psychology* 41, no. 1-2 (2008): 127-150; W. N. Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, no. 3 (2000): 347-364.

Keempat, originalitas pada level integrasi perspektif gender dengan keilmuan dakwah. Penelitian ini merupakan salah satu yang pertama mengintegrasikan secara eksplisit perspektif Gender and Development (GAD) dan interseksionalitas ke dalam kerangka kajian dakwah struktural di Indonesia. Mayoritas kajian dakwah yang ada tidak mengoperasionalkan analisis gender secara metodis; sebaliknya, kajian gender di Indonesia yang berbasis perspektif Islam (Islamic feminism) umumnya beroperasi dalam domain teologi dan fiqh, bukan dalam domain kebijakan publik desa. Dengan mempertemukan dua arus kajian ini dalam satu desain penelitian yang koheren, penelitian ini membuka jalur akademik baru yang dapat menjadi model bagi penelitian-penelitian interdisipliner serupa di masa mendatang.

Perlu dinyatakan pula bahwa originalitas penelitian ini tidak mengklaim telah menghasilkan teori baru yang berdiri sendiri secara penuh melainkan mengklaim telah menghasilkan model konseptual baru (MKDSD) yang dihasilkan dari sintesis antara teori-teori yang ada dengan temuan empiris yang baru. Pendekatan "*theory building through case study*"⁸² ini secara metodologis diakui sebagai salah satu cara yang paling produktif untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya ketika fenomena yang dikaji belum cukup dipahami melalui teori-teori yang ada.

⁸² K. M. Eisenhardt, "Building Theories from Case Study Research," *Academy of Management Review* 14, no. 4 (1989): 532–550.